

**PENGETATAN KEBIJAKAN IMIGRASI INTERNASIONAL JEPANG DALAM
MENGATASI ANCAMAN IDENTITAS NASIONAL TAHUN 2021-2024**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

ZAHARA AINI FIJRIA AZZUHRO

21323274

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

**PENGETATAN KEBIJAKAN IMIGRASI INTERNASIONAL JEPANG DALAM
MENGATASI ANCAMAN IDENTITAS NASIONAL TAHUN 2021-2024**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

ZAHARA AINI FIJRIA AZZUHRO

21323274

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

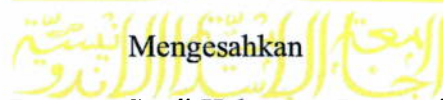
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Pengetatan Kebijakan Imigrasi Internasional Jepang Dalam Mengatasi Ancaman Identitas Nasional Tahun 2021-2024

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Prodi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh derajat
Sarjana S1 Hubungan Internasional



Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A.
- 2 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.
- 3 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

Gustri Eni Putri

Hasbi Aswar

Enggar Furi Herdianto

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 3 Februari 2025



Zahara Aini Fijria Azzuhro

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
ABSTRAK	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	15
1.8 Metode Penelitian	16
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	<i>16</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	<i>16</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	<i>16</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	<i>17</i>
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB 2 IDENTITAS NASIONAL DAN DAMPAK FENOMENA SHOUSHIKA TERHADAP KEBIJAKAN IMIGRASI INTERNASIONAL JEPANG	19
2.1 Identitas Nasional Jepang dan fenomena Shoushika	19
2.2 Dampak Fenomena Shoushika Terhadap Kebijakan Imigrasi Jepang	27
BAB 3 KEBIJAKAN IMIGRASI JEPANG DALAM MENGATASI ANCAMAN IDENTITAS NASIONAL MELALUI TEORI KEBIJAKAN IMIGRASI INTERNASIONAL	34
3.1 Pendekatan Identitas Nasional Dalam Kebijakan Imigrasi Internasional Jepang Untuk Mengatasi Ancaman Identitas Nasional Tahun 2021-2024.	34
3.1.1 Homogenitas Jepang	34
3.1.2 Etnonasionalisme Jepang	40
3.1.3 Ketegangan sosial Jepang	45
BAB 4 PENUTUP	54
4.1. Kesimpulan	54
4.2 Rekomendasi	56
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Jumlah Populasi Jepang Pada Tahun 2024	23
Gambar.2 Jumlah Tenaga Kerja Asing di Jepang	37
Gambar.3 Data Statistik Pengungsi di Jepang Tahun 2019-2023	48

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: Association Of Southeast Asian Nations
GDP	: Gross Domestic Product
GNP	: Gross National Product
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICA	: Immigration Control Act
ICRRA	: Immigration Control And Refugee Recognition Act
ISA	: Immigration Service Agency
PM	: Perdana Menteri
SSW 1	: Specified Skilled Worker Type 1
SSW 2	: Specified Skilled Worker Type 2
TITP	: Technical Intern Training Program
UNHCR	: United Nations High Commissioner for Refugees
UU	: Undang-undang
RUU	: Rancangan Undang-undang
SARA	: Suku Ras Agama dan Antar golongan
WNA	: Warga Negara Asing

ABSTRAK

Jepang dikenal sebagai negara dengan identitas nasional yang kuat dengan membatasi pengaruh luar. Fenomena *shoushika* yang terjadi di Jepang merupakan krisis demografis yang ditandai dengan penurunan angka kelahiran dan peningkatan populasi penduduk lanjut usia yang tidak seimbang. Penurunan angka kelahiran dan penuaan populasi akibat fenomena *shoushika* semakin meningkat dalam kurun waktu 2021-2024. Fenomena *shoushika* mengakibatkan depopulasi angkatan kerja domestik yang menciptakan lonjakan arus tenaga kerja asing setiap tahunnya akibat kebijakan imigrasi era PM Shinzo Abe yang terus diberlakukan hingga 2023. Lonjakan arus imigran mengalami peningkatan pada periode 2021-2024 baik tenaga kerja asing maupun pengungsi yang mengancam identitas nasional Jepang. Sehingga dalam mengatasi ancaman identitas nasional, Perdana Menteri Fumio Kishida melakukan reformasi kebijakan imigrasi dengan memperketat aturan terhadap imigran yang diajukan pada tahun 2023 melalui amandemen Undang-undang Kontrol Imigrasi dan Pengakuan pengungsi. Penelitian ini menganalisis mengapa Jepang mengambil Kebijakan imigrasi dalam mengatasi ancaman identitas nasional tahun 2021-2024 melalui teori Kebijakan Imigrasi Internasional oleh Eytan Meyers dengan pendekatan yaitu, Pendekatan Identitas Nasional yang menekankan keunikan negara dalam membentuk kebijakan imigrasi dengan mengedepankan tradisi, budaya dan homogenitas Jepang. Dalam penelitian ini, Melalui teori kebijakan imigrasi internasional ditemukan faktor-faktor yang mendasari Jepang memperketat kebijakan imigrasi sebagai langkah strategis dalam mengatasi ancaman identitas nasional.

Kata-kata kunci: Kebijakan Imigrasi Internasional, Amandemen Kebijakan Imigrasi Jepang, Identitas Nasional, PM Fumio Kishida, Imigran.

ABSTRACT

Japan is known as a country with a strong national identity that limits outside influences. The shoushika phenomenon occurring in Japan is a demographic crisis characterized by a decrease in the birth rate and an unbalanced increase in the elderly population. The decline in the birth rate and the aging of the population due to the shoushika phenomenon will further increase in the 2021-2024 period. The shoushika phenomenon results in the depopulation of the domestic labor force which creates a surge in the flow of foreign workers every year due to PM Shinzo Abe's immigration policy which continues to be enforced until 2023. The surge in immigrant flows has increased in the 2021-2024 period, both foreign workers and refugees which threatens Japan's national identity. So in overcoming the threat of national identity, Prime Minister Fumio Kishida reformed the immigration policy by tightening the rules on immigrants proposed in 2023 through amendments to the Immigration Control and Refugee Recognition Act. This study analyzes why Japan took immigration policy in overcoming the threat of national identity in 2021-2024 through the theory of International Immigration Policy by Eytan Meyers with an approach, namely, the National Identity Approach which emphasizes the uniqueness of the state in shaping immigration policy by promoting Japanese tradition, culture and homogeneity. In this study, through the theory of international immigration policy, it was found that the factors underlying Japan tightened its immigration policy as a strategic step in overcoming the threat of national identity.

Keywords: International Immigration Policy, Japan Immigration Policy Amendment, National Identity, PM Fumio Kishida, Immigrants.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jepang dikenal sebagai negara mono-etnis yang secara geografis terisolasi dari negara-negara sekitarnya. Sejak perang dunia ke II, Jepang merupakan negara dengan identitas nasional yang kuat dalam bidang teknologi, ekonomi, dan pengambilan keputusan pemerintah. Secara historis, Jepang memberlakukan undang-undang imigrasi yang ketat untuk mengatur mobilitas penduduk dan seringkali dengan sengaja membatasi masuknya imigran asing. Sejak restorasi Meiji, perkembangan globalisasi dan modernisasi telah membawa dampak baik bagi Jepang dalam memajukan pendidikan, perekonomian dan teknologi. Merk-merk buatan Jepang sangat terkenal di seluruh dunia, seperti Toyota, Sony, Fujifilm, Panasonic dan lainnya. Bahkan, Jepang menjadi salah satu negara yang masuk dalam daftar negara dengan GDP atau GNP per kapita tertinggi di dunia urutan ke 21. Akan tetapi disisi lain, Jepang menjadi salah satu negara di Asia Timur yang memiliki permasalahan demografis dengan pertumbuhan penduduk yang rendah. Permasalahan demografis di Jepang disebut dengan Fenomena *Shoushika* (Kresnawati 2013, 34).

Fenomena *Shoushika* merupakan penurunan angka kelahiran dengan mendominasinya jumlah penduduk lanjut usia. Fenomena *Shoushika* mengakibatkan ketidakseimbangan populasi di Jepang. Dimana Jepang mengalami penurunan angka kelahiran yang tinggi secara terus menerus, sementara populasi lanjut usia terus meningkat. Penurunan angka kelahiran terus terjadi dan tidak sesuai dengan populasi

yang dibutuhkan Jepang. Fenomena *Shoushika* menjadi permasalahan serius bagi Jepang yang berdampak pada krisis demografis yang harus dihadapi oleh Jepang sampai saat ini. Dimana jumlah anak yang dilahirkan tidak cukup untuk menggantikan populasi yang menua dan mengakibatkan penurunan populasi secara keseluruhan (Chomsah 2022, 12).

Fenomena *shoushika* dipicu oleh kebijakan pembatasan memiliki anak, pada tahun 1950-an terjadi kemajuan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di Jepang dengan tumbuhnya GNP perkapita dan ekonomi yang berangsur membaik. Sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah kelahiran sebesar 1% per tahun. Karena meningkatnya jumlah kelahiran, Jepang akhirnya memutuskan untuk menerapkan kebijakan pembatasan memiliki anak atau batas kelahiran dan melegitimasi aborsi sebagai upaya mencegah peningkatan jumlah kelahiran. Hal tersebut merupakan pemicu terjadinya fenomena *shoushika* yang berdampak pada krisis demografis dan perekonomian di Jepang (Chomsah 2022, 11).

Faktor pemicu yang menyebabkan fenomena *shoushika* di Jepang adalah konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh modernisasi. Modernisasi yang masuk ke Jepang mempengaruhi kehidupan perempuan Jepang yang lekat dengan tradisi dan budaya Jepang. Kemajuan ekonomi Jepang yang dipengaruhi oleh modernisasi mendorong perempuan Jepang untuk menjadi wanita karir dan mengubah cara hidup mereka dengan tidak ingin mencampuri kehidupan pernikahan dengan karir mereka. Perempuan Jepang menjadikan pernikahan sebagai pilihan hidup bukan kewajiban. Perempuan lebih berani mengambil keputusan untuk menentukan pilihan hidupnya tanpa terkekang dengan budaya dan tradisi Jepang yang menjadi bagian dari identitas

nasional Jepang. Perempuan Jepang banyak yang memilih untuk menunda pernikahan (*bankonka*), tidak ingin menikah (*hikonka*), memilih untuk tidak memiliki anak (*child free*), dan membatasi diri untuk memiliki maksimal satu anak (*hitorika*), serta banyak pilihan hidup perempuan Jepang lainnya (Widiandari 2016, 33).

Sejak tahun 1975, Fenomena *Shoushika* telah menjadi permasalahan demografis Jepang. Dalam permasalahan demografis Jepang, Proses penuaan populasi dipercepat oleh penurunan angka kelahiran yang signifikan, cepat, dan drastis. Jumlah populasi dengan usia lanjut di Jepang semakin meningkat dan Jepang terbukti menjadi negara dengan angka harapan hidup tertinggi di dunia yaitu mencapai 84,6 tahun. Sementara itu, populasi usia muda terus menurun akibat angka kelahiran yang sangat rendah. Berdasarkan data menunjukkan bahwa pada Oktober 2022, penduduk dengan usia 65 tahun ke atas mencapai 29,1% dari total populasi Jepang (Fatimah dkk 2024, 40).

Fenomena *shoushika* merupakan krisis demografis yang memiliki dampak serius bagi Jepang dan memberikan ancaman terhadap populasi Jepang untuk generasi mendatang. Dalam periode 2021-2024, Fenomena *Shoushika* menjadi permasalahan yang semakin kompleks. Dimana pada tahun 2021 terjadi penurunan populasi sebanyak 644 ribu jiwa dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2022 sebanyak 556 ribu jiwa. Penurunan tingkat kelahiran terbesar terus terjadi secara masif sampai tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 5,1 persen. Bahkan fenomena *shoushika* semakin memburuk pada tahun 2024 dengan 350 ribu jumlah kelahiran yang menurun 6% dibanding 2023 (CNN Indonesia 2024).

Sejak masa pemerintahan PM Shinzo Abe berkomitmen menangani masalah penurunan populasi yang berdampak pada krisis tenaga kerja domestik. Upaya-upaya kebijakan telah dilakukan untuk mengatasi Fenomena *Shoushika* di Jepang. PM Shinzo Abe mengusulkan konsep yang cukup berani, yaitu menggunakan *kekkon katsudo* (program perjodohan) sebagai solusi yang dianggap lebih cocok untuk Jepang. Pemerintah Jepang bahkan mengalokasikan dana hingga ratusan juta yen untuk mendukung kegiatan perjodohan ini. Namun, faktor *kekkon katsudo* tidak menjadi solusi efektif untuk mengatasi krisis tenaga kerja domestik di Jepang. Sehingga, PM Shinzo Abe berupaya melalui kebijakan imigrasi internasional untuk mengatasi ancaman identitas nasional akibat fenomena *shoushika* yang berdampak pada krisis demografis Jepang (Theresia 2024).

Undang-undang Kontrol Imigrasi sudah diatur di Jepang sejak tahun 1951. Pada tahun 1990 an Jepang mulai melakukan amandemen kebijakan imigrasi. Jepang dikenal sebagai negara dengan kebijakan imigrasi yang ketat dan selektif dalam penerimaan imigran. Akan tetapi, Krisis demografis akibat fenomena *shoushika* mendorong PM Shinzo Abe untuk mulai melonggarkan kebijakan imigrasi dengan melakukan amandemen pada tahun 2018, Kebijakan imigrasi yang diamandemen oleh PM Shinzo Abe mulai diberlakukan pada tahun 2019. Kebijakan imigrasi yang disahkan oleh PM Shinzo Abe merupakan upaya untuk menangani krisis tenaga kerja domestik akibat fenomena *shoushika*. Akan tetapi, Kebijakan imigrasi yang telah disahkan menuai banyak kritik dari berbagai pihak, karena kebijakan ini akan membuka peluang yang lebih luas kepada tenaga kerja asing dengan jumlah yang besar sekitar 345.000 pekerja untuk masuk ke Jepang di berbagai sektor

perekonomian yang telah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun. Kebijakan imigrasi yang semakin terbuka terhadap imigran menciptakan ancaman identitas nasional Jepang (BBC News Indonesia 2018).

PM Fumio Kishida menggantikan PM Shinzo Abe pada tahun 2021, PM Fumio Kishida mengakui bahwa fenomena *shoushika* merupakan penghalang dalam mempertahankan fungsi sosial dan ekonomi Jepang yang berkelanjutan. Dimana isu ini menjadi fokus utama dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Salah satu dari berbagai kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah Jepang adalah memperluas akses bagi tenaga kerja asing dan imigran untuk bekerja di Jepang sebagai upaya menanggulangi dampak negatif dari penurunan ekonomi. Dalam menangani hal ini, PM Fumio Kishida juga melakukan berbagai upaya yaitu meningkatkan bantuan pemerintah mulai dari biaya perawatan anak, kehamilan, pendidikan dan lainnya untuk meningkatkan angka kelahiran. Akan tetapi, fenomena *shoushika* terus meningkat setiap tahunnya. Disisi lain, kebijakan imigrasi di era PM Shinzo Abe masih berlaku dengan keterbukaannya terhadap tenaga kerja asing. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah imigran yang signifikan yang menciptakan ketegangan sosial. Sehingga, pada masa pemerintahan PM Fumio Kishida menjadikan kebijakan imigrasi internasional sebagai upaya mengatasi fenomena *shoushika* yang mengancam identitas nasional Jepang (Nhk World Japan 2022).

Ketegangan sosial di Jepang muncul dalam kebijakan imigrasi tahun 2019 yang membuka peluang masuknya imigran. Peningkatan imigran secara terus menerus setiap tahun nya menjadi ancaman terhadap identitas nasional Jepang. Oleh karena itu pada tahun 2021, Jepang kembali merancang amandemen RUU Kontrol

Imigrasi dan Pengungsi. Namun rancangan amandemen tahun 2021 belum berhasil disahkan. Jepang terus melakukan upaya melalui kebijakan imigrasi dalam mengatasi fenomena *Shoushika* karena berdampak pada sosial ekonomi dan identitas nasional Jepang. Pada tahun 2023, PM Fumio Kishida kembali melakukan amandemen dengan struktur amandemen yang diajukan tahun 2021 dan berhasil disahkan meskipun menuai kritik. Kebijakan imigrasi internasional yang disahkan pada tahun 2024 kembali memperketat aturan terhadap imigran baik tenaga kerja asing maupun pengungsi yang akan masuk maupun yang akan memperpanjang izin tinggal di Jepang. Fenomena *Shoushika* yang semakin kompleks tidak membuat Jepang membuka diri terhadap imigran. Kebijakan Imigrasi yang diberlakukan pada tahun 2024 justru dinilai akan membatasi imigran yang masuk ke Jepang (Theresia 2024, 13).

UU Kontrol Imigrasi dan Pengungsi disahkan pada Juni tahun 2024 kembali menuai kritik dari berbagai pihak karena semakin ketat dan dinilai akan mengancam pencari suaka atau pengungsi di Jepang. Pencari suaka khawatir pembatasan jumlah pengajuan status pengungsi dapat menyebabkan deportasi bagi individu yang berisiko mengalami penganiayaan di negara asal. Jepang merupakan negara yang mempunyai kriteria ketat dalam memberikan status pengungsi. Dimana Pada tahun 2022 dari 3.700 permohonan, Jepang hanya menerima sekitar 5% yaitu 202 pengungsi. Berbeda dengan Amerika Serikat dan Eropa yang memberikan suaka kepada puluhan ribu orang setiap tahun. Asosiasi Pengungsi Jepang menyatakan bahwa sistem suaka Jepang menolak banyak orang yang mungkin diakui sebagai pengungsi di negara lain. (Asia 2023).

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis ingin memahami faktor yang mendasari pemerintah Jepang merancang kebijakan imigrasi atau yang disebut kebijakan kontrol imigrasi dan pengungsi yang ketat di Jepang. Dimana Jepang sedang menghadapi tantangan fenomena *shoushika* dan kesulitan dalam menerapkan solusi-solusi untuk mengatasi penyusutan penduduk dengan usia produktif akibat semakin memburuknya fenomena *shoushika*. Akan tetapi, mendatangkan imigran dari luar menjadi kekhawatiran akan ancaman identitas nasional Jepang. Penulis ingin mendalami lebih lanjut Mengapa Jepang Melakukan Pengetatan Kebijakan Imigrasi Internasional dalam mengatasi ancaman identitas nasional Tahun 2021-2024 melalui “Teori kebijakan imigrasi internasional” oleh Eytan Meyers (Meyers 2000).

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Jepang Melakukan Pengetatan Kebijakan Imigrasi Internasional dalam Mengatasi Ancaman Identitas Nasional Tahun 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mengapa Jepang melakukan pengetatan kebijakan imigrasi internasional dalam mengatasi ancaman identitas nasional Tahun 2021-2024.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini menganalisis Mengapa Jepang Melakukan Pengetatan Kebijakan Imigrasi dalam mengatasi ancaman identitas nasional Tahun 2021-2024. Pemilihan rentang waktu 2021-2024 adalah dengan mempertimbangkan adanya penurunan angka kelahiran secara drastis dan amandemen kebijakan kontrol imigrasi

dan pengungsi. Dimana tahun 2021 terdapat 599.000 jumlah kelahiran dan diikuti dengan arus imigran yang melonjak pada tahun 2022 akibat kebutuhan tenaga kerja karena berlakunya kebijakan imigrasi tahun 2018 pada masa Shinzo Abe yang menjadi ancaman akan identitas nasional Jepang. Pada tahun 2023, Jepang mengalami penurunan angka kelahiran dengan rekor terendah dari tahun sebelumnya yaitu 5,1% dan penurunan populasi sebesar 758.631 ribu. Hal ini diperburuk oleh penurunan angka pernikahan yang semakin anjlok yaitu 5,9% menjadi sebesar 489.281 ribu. Fenomena *shoushika* semakin memburuk pada tahun 2024 mencapai titik terendah jumlah kelahiran dalam sejarah sedangkan jumlah imigran semakin banyak menciptakan ketegangan sosial. Untuk mengatasi penyusutan jumlah tenaga kerja dengan usia produktif akibat fenomena *shoushika* yang mengancam identitas nasional Jepang, Jepang kembali mengambil kebijakan imigrasi dalam mengatasi ancaman identitas nasional akibat semakin banyaknya imigran yang masuk ke Jepang.

Penelitian ini dimulai pada tahun 2021 karena PM Fumio Kishida menjabat sebagai perdana menteri Jepang. Pada tahun 2021 Jepang mulai berupaya melakukan pengetatan kebijakan imigrasi melalui amandemen Kebijakan Imigrasi dan pengungsi namun belum berhasil disahkan karena menuai banyak kritik. Kemudian pada tahun 2023, PM Fumio Kishida Jepang kembali melakukan upaya amandemen kebijakan imigrasi internasional dan berhasil disahkan. Melalui pengetatan kebijakan imigrasi internasional tahun 2024 dinilai ideal untuk Jepang. Penelitian ini diakhiri pada tahun 2024 karena pada tahun tersebut pemerintah Jepang berhasil mengesahkan kebijakan imigrasi yang semakin ketat sebagai upaya mengatasi ancaman identitas nasional akibat fenomena *shoushika*. Dalam penelitian ini berfokus terhadap Analisis

Pengetatan Kebijakan Imigrasi Internasional Jepang dalam mengatasi ancaman identitas nasional Tahun 2021-2024.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan sumber-sumber penelitian terdahulu untuk memberikan kejelasan informasi mengenai fenomena *Shoushika* yang terjadi di Jepang. Yohana Theresia dalam tulisan nya yang berjudul “Dilema Fenomena *Shoushika* Tahun 2020-2023: Antara Kebijakan Imigrasi dan Pelanggaran HAM di Jepang”. Secara garis besar penelitian yang dilakukan oleh Yohana Theresia membahas Krisis populasi di Jepang yang disebabkan oleh transisi demografis, di mana tingkat kelahiran yang menurun tidak seimbang dengan jumlah penduduk lanjut usia yang meningkat signifikan selama periode 2020-2022. Penelitian Yohana Theresia hanya menjelaskan dampak fenomena *shoushika* terhadap ancaman ekonomi dan keamanan nasional di Jepang. Dalam tulisannya, Yohana Theresia berfokus pada dampak RUU kontrol imigrasi yang dianalisis melalui perspektif HAM dan belum menjelaskan apa yang melatar belakangi pemerintah Jepang mengambil kebijakan imigrasi internasional yang semakin ketat di era PM Fumio Kishida (Theresia 2024).

Kemudian dalam Jurnal Transborders yang ditulis oleh Karo, M. T. B. dkk, dengan judul “Fenomena Shoushika: Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Era Kepemimpinan Shinzo Abe” menjelaskan bahwa dalam mengatasi fenomena shoushika yang berdampak kurangnya tenaga kerja domestik dengan usia produktif mendorong PM Shinzo Abe mengambil kebijakan dengan mempermudah dan membuka peluang masuknya tenaga kerja asing sebagai solusi terhadap ancaman ekonomi. Akan tetapi, solusi kebijakan yang membuka masuknya imigrasi

menciptakan dilema akan identitas negara Jepang. Penelitian dalam jurnal tersebut menganalisis kebijakan pada era PM Shinzo Abe sebagai upaya mengatasi fenomena shoushika. Namun belum menjelaskan amandemen kebijakan imigrasi pada era PM Fumio Kishida (Terapulina dan Hikmatullah 2021).

Dalam Jurnal Pena Wimaya yang ditulis oleh Fatimah dkk, dengan judul “Efektivitas Kebijakan Sekuritisasi Jepang untuk Mengatasi Isu Penurunan Angka Kelahiran Tahun 2005-2022” menjelaskan bahwa angka kelahiran di Jepang merupakan hal krusial yang menjadi perhatian utama oleh pemerintah Jepang dalam membuat kebijakan yang mendorong angka kelahiran. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa upaya pemerintah melalui pembuatan kebijakan merupakan bentuk sekuritisasi pemerintah Jepang dalam mengatasi isu penurunan angka kelahiran di Jepang pada tahun 2005-2022. Penurunan angka kelahiran ini merupakan ancaman keamanan negara Jepang. Sekuritisasi adalah upaya oleh aktor negara untuk mengubah isu politis menjadi masalah keamanan sehingga negara dapat mengambil langkah untuk menanganinya. Penelitian diatas berfokus pada analisis sejauh mana upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh Jepang dalam meningkatkan angka kelahiran. Dalam penelitian diatas belum menjelaskan alasan pemerintah Jepang mengamandemen kebijakan imigrasi yang semakin ketat pada tahun 2023 (Fatimah dkk. 2024).

Pada jurnal penelitian yang berjudul “Faktor *Aging Population* di Jepang dan Upaya Pemerintah Jepang dalam Mengatasi Fenomena Tersebut” yang ditulis oleh Mochamad Bintang Putra Eryano dkk menjelaskan bahwa Populasi yang menua atau *aging population* merupakan masalah serius di Jepang. Setiap tahun, Jepang

mengalami angka kelahiran yang terus menurun, sementara angka harapan hidup yang tinggi menyebabkan populasi Jepang semakin cepat menua. Melalui teori perubahan sosial, penelitian ini menjelaskan penyebab terjadinya fenomena *aging population* dan meneliti strategi pemerintah Jepang. Namun penelitian ini belum menjelaskan pengetatan kebijakan imigrasi Jepang dalam menangani ancaman identitas nasional akibat fenomena *shoushika* (Eryano dkk. 2023).

Berdasarkan penjelasan diatas telah disampaikan terkait penanganan penurunan populasi di Jepang yang menjadi ancaman ekonomi dan keamanan nasional Jepang melalui berbagai kebijakan seperti kebijakan sekuritisasi, pelanggaran HAM Jepang, dan strategi kebijakan imigrasi serta faktor-faktor yang menyebabkan penurunan angka kelahiran sampai solusi mengatasinya. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian diatas adalah fokus tahun penelitian dan fokus pembahasan yaitu kebijakan imigrasi internasional. Penelitian diatas belum menjelaskan mengapa Jepang melakukan pengetatan kebijakan imigrasi internasional dalam mengatasi ancaman identitas nasional Tahun 2021-2024 melalui teori kebijakan imigrasi internasional. Inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Teori Kebijakan Imigrasi Internasional

Dalam menganalisis kebijakan imigrasi di Jepang, penelitian ini menggunakan landasan teori kebijakan imigrasi internasional yang digagas oleh Eytan Meyers. Eytan Meyers merupakan seorang ilmuwan yang menganalisis migrasi internasional melalui sudut pandang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam

tulisannya yang berjudul *"Theories of International Immigration Policies A Comparative Analysis"* pada tahun 2000, Eytan Meyers menguraikan bahwa kebijakan pengendalian imigrasi merupakan komponen yang sangat penting dalam menentukan pola serta proses imigrasi yang terjadi, terutama di negara-negara penerima. Menurut Eytan Meyers, teori kebijakan imigrasi internasional menyoroti kebijakan imigrasi yang mengatur imigran baik pekerja migran maupun pengungsi. Teori Kebijakan Imigrasi Internasional yang digagas oleh Eytan Meyers untuk menganalisis kebijakan imigrasi internasional dikategorikan menjadi beberapa pendekatan. Pendekatan ini meliputi pendekatan politik dan hubungan internasional yaitu Pendekatan Marxisme, Pendekatan Institusional, Pendekatan Domestik, Pendekatan Realisme, Pendekatan Liberalisme, dan Pendekatan Identitas Nasional (Meyers 2000).

- A. Pendekatan Identitas Nasional, merupakan pendekatan yang mengedepankan budaya, tradisi, warisan sejarah, dan ketegangan sosial sebagai acuan dalam membentuk kebijakan imigrasi. Pendekatan identitas nasional menekankan sejarah dan tradisi khas setiap negara dengan mengadopsi pendekatan historis, dengan mengesampingkan relevansi faktor-faktor eksternal (Meyers 2000).
- B. Pendekatan Politik Domestik, merupakan pendekatan yang berpusat pada penduduk. Dalam pendekatan Politik domestik menjadikan aspek ekonomi dan sosial negara sebagai acuan dalam mempengaruhi kebijakan imigrasi. Menurut pendekatan Politik domestik, negara merupakan aktor yang netral bagi kepentingan penduduk.

- C. Pendekatan Institusional, merupakan pendekatan yang menjelaskan tentang komplikasi proses yang mengarah pada kebijakan imigrasi. Hal ini terutama berkaitan dengan kebijakan imigrasi tentang pengungsi dan pekerja migran. Menurut pendekatan institusional, lembaga politik dapat membentuk kebijakan publik sesuai dengan kepentingan negara dan tidak terpengaruh oleh tekanan penduduk atau kelompok kepentingan.
- D. Pendekatan Marxisme, merupakan pendekatan dalam teori kebijakan imigrasi internasional yang menyoroti kebijakan migran pekerja dan kasus imigran ilegal yang memiliki keterhubungan antara kebijakan imigrasi dan kondisi ekonomi. Menurut pendekatan marxisme imigrasi tenaga kerja merupakan bagian struktur dari kapitalis dan kebijakan negara terkait imigrasi yang lebih mudah dan terbuka dimanfaatkan untuk meningkatkan tenaga kerja asing serta akan mengatasi permasalahan kurangnya tenaga kerja domestik.
- E. Pendekatan Realisme, merupakan pendekatan dalam hubungan internasional yang menjadikan negara sebagai aktor terpenting dan aktor utama. Dalam pendekatan realisme memiliki fokus pada dampak konflik antar negara terhadap kebijakan imigrasi. Pendekatan realisme menjadikan isu keamanan sebagai fokus utama, sedangkan isu-isu ekonomi dan sosial dipandang kurang penting. Menurut pendekatan realisme konflik-konflik antar negara seperti konflik militer dapat mempengaruhi negara dalam menentukan kebijakan imigrasi. Karena konflik-konflik tersebut berkontribusi pada kebijakan pembatasan imigrasi.

F. Pendekatan Liberalisme, merupakan pendekatan yang mengedepankan kerjasama kebijakan dan keterbukaan antarnegara terhadap pengambilan keputusan dalam kebijakan imigrasi. Berbeda dengan kaum realisme, pendekatan Liberalisme berasumsi bahwa aktor non-negara seperti organisasi internasional dan perusahaan multinasional merupakan aktor kunci dalam hubungan internasional. Pendekatan ini juga menekankan bahwa isu-isu ekonomi dan sosial sama pentingnya dengan masalah militer (Meyers 2000).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu pendekatan dalam teori kebijakan imigrasi internasional yaitu Pendekatan Identitas Nasional dalam menganalisis mengapa Jepang melakukan pengetatan kebijakan imigrasi dalam mengatasi ancaman identitas nasional Tahun 2021-2023. Pendekatan Identitas nasional yang mengedepankan tradisi dan warisan budaya serta sejarah yang melekat pada penduduk Jepang sebagai pertimbangan dalam proses pembentukan kebijakan. Hal ini sejalan dengan yang terjadi di Jepang, dimana Jepang secara historis melakukan kebijakan imigrasi yang terbatas. Dalam merespon fenomena *shoushika* yang berdampak lonjakan imigran yang mengancam identitas nasional Jepang, PM Fumio Kishida kembali melakukan pengetatan kebijakan imigrasi di Jepang. Meskipun Jepang membutuhkan tenaga kerja asing dalam perekonomian, Pendekatan Identitas nasional tetap menjadi prioritas Jepang dengan membatasi imigrasi melalui kebijakan imigrasi yang ketat dan tidak membuka diri sepenuhnya untuk meningkatkan imigran di Jepang (Meyers 2000).

Penelitian ini tidak menggunakan lima pendekatan lainnya dalam teori kebijakan imigrasi internasional yaitu Pendekatan Politik Domestik, Pendekatan

Institusional, Pendekatan Marxisme, Pendekatan Liberalisme dan Pendekatan Realisme. Karena penelitian ini berfokus pada ancaman identitas nasional Jepang akibat kebijakan imigrasi Jepang yang dilonggarkan dan terbuka di era PM Shinzo Abe. Sehingga dalam menganalisis penelitian ini cukup menggunakan pendekatan Identitas nasional yang relevan dengan topik penelitian. Lima pendekatan lainnya yaitu Pendekatan Politik Domestik, Pendekatan Institusional, Pendekatan Marxisme, Pendekatan Liberalisme dan Pendekatan Realisme tidak relevan dengan topik penelitian yang akan dianalisis. Sedangkan pendekatan-pendekatan tersebut sangat kontradiktif dengan kebijakan imigrasi Jepang di Era PM Fumio Kishida dalam mengatasi ancaman identitas nasional, dimana pada tahun 2023 Jepang kembali melakukan amandemen RUU dengan semakin memperketat aturan terhadap imigrasi (Meyers 2000).

1.7 Argumen Sementara

Fenomena *Shoushika* di Jepang merupakan permasalahan yang berdampak pada sektor ekonomi dan sosial. Jepang merupakan negara industri dengan kemajuan ekonomi yang sangat pesat. Akan tetapi, Jepang menjadi negara dengan permasalahan demografis yaitu penurunan angka kelahiran yang disebut sebagai Fenomena *Shoushika*. Pada masa pemerintahan PM Shinzo Abe, kebijakan imigrasi Jepang mengalami pelanggaran yang mengakibatkan tingginya lonjakan arus imigran yang menjadi ancaman identitas nasional Jepang. Sehingga dalam menangani fenomena *shoushika* yang mengancam identitas nasional Jepang, Jepang masih belum bisa membuka diri sepenuhnya dan melalui kebijakan imigrasi. Meskipun tenaga kerja asing membantu keberlanjutan ekonomi Jepang. Akan tetapi, Kebijakan kontrol

imigrasi dan pengungsi yang telah diamandemen oleh PM Fumio Kishida justru semakin memperketat kebijakan imigrasi. Melalui teori kebijakan imigrasi internasional, Pendekatan Identitas nasional menekankan pentingnya warisan sejarah, tradisi, dan identitas kultural dalam pembentukan kebijakan imigrasi. Jepang merupakan negara dengan identitas nasional yang kuat dan berfokus pada stabilitas sosial cenderung mempertahankan kebijakan yang menekankan kontrol terhadap imigrasi.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, Dimana penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian ini berfokus pada analisis secara mendalam terhadap Pengetatan Kebijakan Imigrasi Internasional Jepang Dalam Mengatasi Ancaman Identitas nasional Tahun 2021-2024.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Jepang, dimana Jepang merupakan aktor dalam menentukan kebijakan imigrasi internasional sebagai respon dalam menangani ancaman identitas nasional. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah ancaman identitas nasional yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan Imigrasi yang semakin ketat di Jepang.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan data melalui literatur yang relevan. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui buku, artikel jurnal, artikel opini, dan analisis berita

baik melalui website maupun secara fisik yang dapat menjadi acuan dalam menganalisis pengetahuan kebijakan imigrasi internasional Jepang dalam mengatasi ancaman identitas nasional Tahun 2021-2024.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan teori yang digunakan. Data yang telah terkumpul kemudian ditelaah kembali sebagai pendukung proses penelitian untuk mencari jawaban dari pertanyaan penelitian. Setelah proses telaah, berikutnya mengembangkan pemahaman mengenai masalah utama yang diteliti dengan informasi dari sumber-sumber yang relevan dan dapat dipercaya. Kemudian, melakukan penyusunan hasil penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab 1 Pendahuluan : Bab Pertama dalam penelitian ini menjelaskan latar belakang , rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab 2 Fenomena Shoushika dan Implikasi Terhadap Kebijakan Imigrasi Internasional Jepang : Pada Bab Kedua, penelitian ini menjelaskan tentang dampak fenomena *Shoushika* terhadap peningkatan imigran, identitas nasional Jepang, dan kebijakan imigrasi Jepang berdasarkan sumber dan data yang mendukung pernyataan. Bab ini menjadi fokus utama yang menjadi dasar dalam menerapkan teori.

Bab 3 Kebijakan Imigrasi Jepang Dalam Mengatasi Fenomena *Shoushika* Melalui Teori Kebijakan Imigrasi Internasional : Pada Bab Ketiga, penelitian ini akan meninjau Pengetatan Kebijakan Imigrasi Internasional Jepang dalam mengatasi

Ancaman Identitas Nasional melalui Teori Kebijakan Imigrasi Internasional oleh Eytan Meyers dengan satu pendekatan yaitu Pendekatan Identitas Nasional. Penulis juga menelaah kembali keterkaitan antara variabel kasus dan konsep teori untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab 4 Kesimpulan dan Rekomendasi : Pada Bab 4, Penelitian ini menguraikan kesimpulan tentang seluruh pemaparan penelitian dan memberikan rekomendasi penelitian selanjutnya.

BAB 2

IDENTITAS NASIONAL DAN DAMPAK FENOMENA *SHOUSHIKA* TERHADAP KEBIJAKAN IMIGRASI INTERNASIONAL JEPANG

2.1 Identitas Nasional Jepang dan fenomena *Shoushika*

Jepang dikenal sebagai negara maju dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat dan identitas nasional negara yang kuat. Dengan kemajuan ekonominya, Jepang memiliki julukan “*The Japan Way*”. Indikator majunya perekonomian di Jepang adalah penduduk Jepang memiliki antusias dan etos yang tinggi dalam melakukan pekerjaan yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Jepang menjadi negara yang menduduki peringkat keempat di dunia berdasarkan dengan pendapatan GNP tertinggi di dunia dan pertumbuhan GDP yang stabil bahkan terus meningkat (Explore Japan 2020).

Jepang tidak memiliki sumber daya alam yang memadai tetapi kekuatan ekonomi Jepang terdapat pada industri manufaktur dan berbagai macam sektor lainnya. Pertumbuhan dan kemajuan perekonomian Jepang menjadi sorotan bagi negara-negara Asia seperti Korea, China, Taiwan, Singapura, dan negara-negara ASEAN (Kresnawati 2013, 31). Jepang berhasil menjadi panutan sebagai negara maju di kawasan Asia yang memainkan peran di ranah Internasional. Meskipun memiliki ekonomi yang relatif stabil dan unggul dibandingkan negara-negara lainnya, Jepang menghadapi tantangan besar dalam permasalahan demografis yang dikenal sebagai fenomena *Shoushika* (Explore Japan 2020).

Fenomena *shoushika* merupakan fenomena menurunnya angka kelahiran yang menciptakan hilangnya populasi dengan usia produktif dan meningkatnya populasi lanjut usia di Jepang. Fenomena *Shoushika* dipengaruhi oleh masuknya perspektif barat ke Jepang sejak restorasi Meiji yang ditandai dengan keterbukaan Jepang dalam hubungan internasional, setelah 260 tahun Jepang mengisolasi negara dengan menutup hubungan luar negeri. Rezim Meiji berusaha membawa Jepang ke era modern dengan membuat kebijakan yang membawa perubahan. Dengan keyakinan Jepang menjadi negara modern pada akhir abad ke-19, Jepang menciptakan kebijakan yang dikenal sebagai *Bunmei Kaika*. *Bunmei Kaika* merupakan fenomena westernisasi Jepang pada era Rezim Meiji yang mengadopsi perspektif barat dengan tujuan menghapus diskriminasi kelas pada zaman feodal. Rezim Meiji berupaya melakukan modernisasi perubahan di berbagai sektor seperti, sektor ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Simorangkir 2017).

Masuknya perspektif barat melalui modernisasi di Jepang mempengaruhi tradisi dan budaya pada penduduk Jepang yang kuat akan identitas nasionalnya. Fenomena *shoushika* yang terjadi di Jepang disebabkan oleh tradisi-tradisi Jepang yang mengikat perempuan. Pra Restorasi Meiji sebelum modernisasi masuk ke Jepang, budaya dan tradisi Jepang berdampak negatif pada perempuan Jepang. Karena tradisi tersebut membuat Perempuan Jepang terkekang dan seringkali mengalami diskriminasi, mereka hanya berperan sebagai seorang ibu dan istri. Perempuan Jepang memiliki tuntutan yang lebih banyak dibanding laki-laki. Dimana berdasarkan tradisi Jepang perempuan akan mengalami 3 fase wajib dalam hidup mereka agar dianggap perempuan yang baik atau ibu yang baik yaitu: Pertama,

perempuan di Jepang akan mengalami fase pernikahan. Kedua perempuan di Jepang akan mengalami fase melahirkan atau memiliki anak. Dan Ketiga, Perempuan harus bertanggung jawab saat anak memasuki jenjang sekolah (Widarahesty 2018, 67).

Tuntutan sosial tersebut memperlihatkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Ketika perempuan Jepang tidak melakukan tuntutan tersebut mereka akan dianggap lebih mengutamakan karir dibanding keluarga dan dijuluki dengan "*Oniyome*" atau "*the Devil Wife*" yang artinya adalah Istri yang jahat. Adanya ideologi "*ookasan gambareron*" istilah dalam tradisi Jepang yang artinya ibu jangan menyerah dan ideologi "*good mother*" membuat wanita Jepang terkekang dengan tradisi karena pembagian peran yang tidak adil dan merata antara laki-laki dan perempuan. Terjadinya modernisasi di Jepang memiliki pengaruh yang kuat dalam melawan "*patriarchal family system*" yang menjadi budaya Jepang (Widarahesty 2018, 67).

Seiring berjalanya waktu, Perkembangan modernisasi masuk ke Jepang dan membawa dampak positif bagi perekonomian Jepang dalam memajukan sektor industri dan teknologi. Bahkan, Jepang berhasil menjadi salah satu negara dengan GDP tertinggi di dunia melalui industrialisasi yang sukses. Hal ini ditandai dengan mendominasinya produk-produk buatan Jepang seperti produk elektronik (NEC, Toshiba, dan Panasonic), otomotif (Honda, Toyota, Suzuki), serta budaya pop seperti manga dan anime yang mendunia khususnya di Eropa dan Asia Tenggara (Explore Japan 2020).

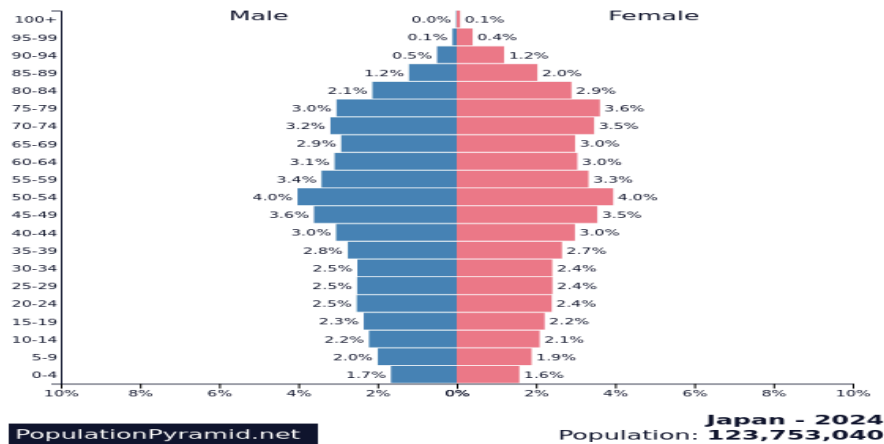
Namun, modernisasi juga berhasil mempengaruhi pola pikir penduduk Jepang khususnya Perempuan yang menyebabkan munculnya fenomena *Shoushika*.

Jepang menjadikan cara hidup perempuan berkarir didorong untuk menunda menikah dan memiliki anak. Karena ketika perempuan memiliki anak akan menambah tanggung jawab yang berat dan menjadi penghambat karir serta pertimbangan biaya yang tidak murah untuk mengurus anak. Wanita di Jepang mulai menyadari akan kebebasan individu dengan menuntut kesetaraan gender dan hak-hak perempuan terutama dalam pendidikan dan pekerjaan. Karena majunya perekonomian di Jepang tidak lepas dari peran perempuan. Sebagian besar pekerja di Jepang 56,9 persen ditopang oleh perempuan yang sudah menikah dan 33,1 persen ditopang oleh wanita single. Dan hal ini didukung oleh kebijakan *Womenomic* yang mempengaruhi pola pikir perempuan dengan mengubah cara hidup mereka yang lebih memilih untuk fokus berkarir dengan menunda menikah, tidak menikah, tidak memiliki anak, atau menunda memiliki anak (Dharma, Simanjuntak, dan Hergianasari 2022, 227).

Kemajuan industrialisasi Jepang dan meluasnya pengaruh modernisasi menciptakan "*Career Woman*" yang dipengaruhi oleh pola pikir perempuan yang mengubah cara hidup mereka. Perempuan Jepang menganggap bahwa karir merupakan fokus utama hidup mereka dan mulai menyadari akan kebebasan individu. Meskipun, Keputusan perempuan Jepang untuk bekerja dan berkarir bertentangan dengan nilai-nilai tradisi Jepang yang konservatif mengenai konsep "keluarga ideal". Dimana dalam tradisi Jepang yang konservatif menuntut perempuan untuk menjadi peran utama dalam urusan rumah tangga dan anak. Modernisasi telah mengubah cara hidup perempuan Jepang, Banyak perempuan yang lebih berani memilih jalan hidupnya untuk tidak menikah dan memilih untuk tidak memiliki anak atau "*Child free*" (Roosiani 2016,77).

Melalui modernisasi, perspektif Barat yang masuk ke Jepang berhasil mengubah pola pikir penduduk terutama pada perempuan Jepang modern yang terkekang oleh tradisi Jepang yang konservatif. Alih-alih menjadi solusi dalam kemajuan perekonomian Jepang melalui modernisasi. Akan tetapi, Modernisasi justru menciptakan permasalahan yang cukup kompleks bagi Jepang. Modernisasi yang terjadi di Jepang membuat fenomena *shoushika* semakin meningkat dan nilai-nilai identitas nasional Jepang yang dijunjung tinggi oleh Jepang semakin tergerus (Dharma, Simanjuntak, dan Hergianasari 2022, 226).

Gambar.1 Jumlah Populasi Jepang Pada Tahun 2024



Sumber : Population of Japan 2024

Berdasarkan grafik diatas menunjukan kondisi populasi Jepang pada tahun 2024 dengan total populasi 123,753,040 jiwa. Dapat dilihat bahwa tingkat penduduk pada rentang usia 45 tahun keatas menunjukan persentase yang besar dengan grafik piramida yang melebar dibanding dengan persentase penduduk dengan usia produktif. Hal ini menunjukan bahwa Jepang memiliki populasi penduduk lanjut usia yang

sangat besar sedangkan populasi dengan usia produktif semakin menurun. Tingginya persentase penduduk lanjut usia ini adalah akibat angka kelahiran yang rendah yang dikenal dengan fenomena *shoushika* dan harapan hidup yang tinggi (Population of Japan 2024).

Perubahan demografis menjadi ancaman akan identitas nasional Jepang yang terjadi akibat adanya globalisasi dan westernisasi di Jepang yang dikenal sebagai fenomena *shoushika*. Fenomena *Shoushika* memiliki dampak serius bagi Jepang, karena fenomena ini dapat memberi ancaman terhadap generasi mendatang. Dampak besar yang kini dirasakan oleh Jepang adalah pada sektor tenaga kerja, dimana Jepang mengalami krisis tenaga kerja yang disebabkan oleh langkanya usia produktif pada penduduk Jepang. Bahkan Jepang diprediksi akan membutuhkan 17 juta imigran pada tahun 2050, Karena jumlah penduduk lanjut usia di Jepang diperkirakan akan meningkat hingga 47% pada tahun 2050. Dampak lain yang akan dirasakan oleh Jepang adalah ancaman identitas nasional Jepang yang menciptakan ketegangan sosial dan memiliki dampak signifikan terhadap keamanan, sosial dan perekonomian negara (Amelia 2021).

Fenomena *Shoushika* berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi sektor tenaga kerja. Fenomena *Shoushika* mengakibatkan pertumbuhan perekonomian Jepang mengalami sedikit penurunan dalam sepuluh tahun terakhir, hal ini diakibatkan oleh menurunnya jumlah pekerja dengan usia produktif dan meningkatkan jumlah pekerja lanjut usia. Fenomena *Shoushika* tidak hanya berdampak pada negara saja, akan tetapi menjadi tantangan bagi individu, perusahaan, dan penduduk Jepang. Dimana Jepang akan membutuhkan banyak

pekerja untuk mendukung perekonomian masa depan. Fenomena *Shoushika* menciptakan tantangan bagi Jepang, karena dapat menjadikan Jepang sebagai negara yang membutuhkan pekerja migran dengan jumlah yang besar. Dan kemudian, Kebutuhan ini akan memicu migrasi internasional ke Jepang yang mengancam identitas nasional Jepang (Nurtyandini dan Kemalasari 2023).

Penurunan populasi mengakibatkan berkurangnya para pekerja domestik dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan peluang masuknya tenaga kerja asing di Jepang. Peningkatan populasi pekerja asing di Jepang dapat menimbulkan ketegangan sosial dan ancaman identitas nasional. Selain itu, Ancaman identitas nasional juga timbul dari dampak imigrasi penduduk asing baik pekerja migran maupun pengungsi terutama terkait dengan meningkatnya potensi kejahatan transnasional dan penyebaran multikulturalisme yang melanggar budaya Jepang akan harmonisasi sosial. Hal ini mencakup kemungkinan besar adanya imigran yang terlibat dalam konflik sosial atau etnis, penunggakan pembayaran pajak, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, serta berbagai tindakan kriminal transnasional lainnya. Terbuka nya lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja asing dan meningkatnya imigran bukan hanya membantu dalam sektor perekonomian. Akan tetapi, dapat menjadi ancaman identitas nasional dan ketegangan sosial bagi Jepang (Fatimah dkk. 2024).

Fenomena *shoushika* menjadi tantangan dan ancaman identitas nasional Jepang, karena perubahan demografis penduduk membuat Jepang harus menciptakan solusi melalui kebijakan negaranya. Dimana Jepang dikenal sebagai negara mono-etnis yang secara geografis terisolasi dari negara-negara sekitarnya. Sejak

perang dunia ke II, Jepang merupakan negara dengan identitas nasional yang kuat dalam bidang teknologi, ekonomi, dan pengambilan keputusan pemerintah. Secara historis, Jepang memberlakukan undang-undang imigrasi yang ketat untuk mengatur mobilitas penduduk dan seringkali dengan sengaja membatasi masuknya imigran asing. Hal ini dilakukan oleh Jepang untuk menjaga homogenitas penduduk Jepang. Fenomena *Shoushika* yang berdampak pada kurangnya tenaga kerja domestik membuat pemerintah Jepang mulai mengambil kebijakan imigrasi untuk mengatasi fenomena *shoushika* dengan menerima tenaga kerja asing atau imigran (PAN 2024).

Jepang dikenal sebagai negara homogen, pandangan ini berakar pada sejarah panjang ras Yamato yang telah memimpin Jepang selama lebih dari 2000 tahun tanpa kehadiran suku bangsa lain. Keunikan budaya Jepang diperkuat oleh letak geografisnya sebagai negara kepulauan yang terisolasi di ujung timur benua Eurasia. Pandangan ini terus dipertegas oleh para elit politik Jepang seperti PM Nakasone Yasuhiro pada 1980-an, yang menegaskan perbedaan Jepang dengan negara-negara seperti Amerika Serikat. Pernyataan homogenitas ini diperkuat oleh Menteri Luar Negeri Tanaka Makiko dan Anggota Parlemen Suzuki Muneo pada tahun 2001, serta Menteri Dalam Negeri Aso Taro pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa Jepang memiliki budaya, peradaban, ras, dan bahasa yang unik. Bahkan pada tahun 2007, Menteri Pendidikan Ibuki Bunmei menegaskan bahwa sejarah panjang ras Yamato menjadi pondasi terbentuknya Jepang sebagai negara yang homogen (Haryadi 2016, 416).

2.2 Dampak Fenomena Shoushika Terhadap Kebijakan Imigrasi Jepang

Pada tahun 1950-an hingga awal 1970-an terjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat di Jepang. Dimana Jepang memiliki banyak peluang kerja dan tenaga kerja asing tidak menjadi kebutuhan yang mendesak untuk Jepang. Namun, untuk menangani isu imigrasi dan pengungsi pemerintah Jepang mulai menerbitkan Perintah Kabinet No. 319 pada tahun 1951, yang kemudian menjadi dasar bagi undang-undang terkait di tahun-tahun berikutnya. Kemudian, Pada tahun 1970-an Jepang mengalami kekurangan tenaga kerja yang signifikan. Dalam mengatasi masalah ini, pada tahun 1990 Jepang memberlakukan revisi atas Undang-Undang Kontrol Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi. Revisi ini memperluas jenis pekerjaan yang tersedia bagi pekerja asing di Jepang, sekaligus menetapkan aturan ketat bagi imigran yang tinggal melebihi izin. Selain itu, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan pembatasan masuk bagi individu "*Nikkeijin*" yaitu orang-orang keturunan Jepang, terutama dari komunitas Jepang di Amerika Selatan. Dengan adanya revisi ini populasi penduduk asing di Jepang semakin meningkat (PAN 2024).

Sejak akhir 1970-an hingga awal 1980-an, Jepang mulai mengambil langkah untuk menghadapi tantangan demografis dan kekurangan tenaga kerja dengan mengadopsi sejumlah perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang diadopsi oleh Jepang diantaranya adalah Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1979), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1979), serta Konvensi tentang Status Pengungsi (1981). Langkah ini berkontribusi pada perluasan sistem kesejahteraan sosial untuk penduduk asing sebagai negara yang

menjadi tujuan pengungsi. Pada tahun 1984, Jepang merevisi undang-undang kewarganegaraan dan pendaftaran keluarga. Undang-undang ini memungkinkan status kewarganegaraan diturunkan oleh ibu, dan terdapat aturan penggunaan nama keluarga asing serta memberikan hak untuk memilih kewarganegaraan pada usia 21 tahun bagi mereka yang lahir dengan lebih dari satu kewarganegaraan (Harrison 2023).

Kemudian, pada tahun 1990 Undang-Undang Kontrol Imigrasi dan Pengungsi disahkan oleh Jepang. Undang-undang ini menciptakan peluang baru melalui “*side door*” bagi imigran atau tenaga kerja tak terampil yang akan masuk ke Jepang. Kebijakan ini didukung oleh program-program khusus seperti visa jangka panjang untuk keturunan Jepang di luar negeri dan magang teknis jangka pendek. Langkah-langkah terbatas ini, menunjukkan adanya upaya Jepang untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan demografis dan kekurangan tenaga kerja (Harrison 2023).

Melalui sistem “*side door*” atau yang dikenal dengan “pintu samping” Pada tahun 1993 Jepang membuka Program Pelatihan Magang Teknis (*Technical Intern Training Program/TITP*) untuk menerima peserta pelatihan dari luar negeri. Meskipun sistem “*side door*” berdampak pada status “peserta pelatihan” ini tidak diakui sebagai pekerja. Peserta pelatihan merupakan karyawan yang terafiliasi dengan perusahaan Jepang di luar negeri. Program TITP dirancang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja asing di perusahaan besar luar negeri. Awalnya, pada tahun 1993-1997 kontrak pelatihan hanya berlangsung 1-2 tahun dan pada tahun 2010 diperpanjang menjadi 3 tahun. Ini menunjukkan bahwa Selama dua pertiga masa

kontrak peserta hanya dianggap sebagai "peserta magang teknis" yang diperlakukan sebagai pekerja (says 2023).

Dalam implementasi TITP, tidak ada perbedaan antara "peserta pelatihan" dan "peserta magang teknis". Oleh karena itu, berdasarkan keputusan pengadilan "peserta pelatihan" dianggap sebagai pekerja yang berhak mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan penuh. Kemudian dilakukan amandemen kebijakan imigrasi pada tahun 2009 dan 2016 sebagai evaluasi akan program yang diberikan imigran (Hamaguchi 2019). Kebijakan mengenai tenaga kerja asing atau imigran di Jepang merupakan perpaduan antara kebijakan imigrasi (*immigration policy*) dengan kebijakan ketenagakerjaan (*labor policy*). Dimana kebijakan imigrasi yang mengatur penetapan syarat dan ketentuan sebagai landasan penyaringan tenaga kerja asing yang ingin masuk ke Jepang. Sedangkan kebijakan ketenagakerjaan yang mengatur landasan pengintegrasian dalam menentukan penempatan tenaga kerja asing yang sudah berada di Jepang (Fauzan dan Paramasatya 2022).

Fenomena *shoushika* yang telah terjadi sejak tahun 1975 semakin meningkat setiap tahunnya. Sehingga, Amandemen kebijakan imigrasi Jepang dilakukan kembali pada masa pemerintahan PM Shinzo Abe untuk mengatasi kurangnya tenaga kerja domestik yang berdampak pada stagnasi ekonomi Jepang. Dimana pada tahun 2018, Shinzo Abe mengusulkan perubahan kebijakan imigrasi yang disebut *Immigration Control Act* (ICA). Kebijakan imigrasi yang ditetapkan Shinzo Abe merupakan perubahan besar yang menciptakan awal terjadinya gelombang imigrasi yang semakin tinggi akibat pelanggaran kebijakan imigrasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja asing di berbagai sektor perekonomian Jepang. Perubahan yang

diusulkan PM Shinzo Abe mulai diberlakukan pada tahun 2019. Perubahan dalam kebijakan imigrasi atau ICA tahun 2019 menciptakan kategori baru untuk tenaga kerja asing atau imigran berdasarkan status kependudukannya yaitu, tenaga kerja berketerampilan rendah (*low skilled workers*) dan tenaga kerja berketerampilan tinggi (*highly skilled workers*). Hal ini menciptakan arus imigran yang semakin meningkat selama kebijakan imigrasi yang ditetapkan oleh PM Shinzo Abe masih berlaku mulai dari 2019 hingga 2023 (Hamaguchi 2019, 3).

Dinamika fenomena *Shoushika* terus menjadi permasalahan demografis di Jepang. Dimana undang-undang ini diberlakukan pada 2019 dengan harapan dapat membuka peluang sekitar 345.000 pekerja asing dalam 5 tahun ke depan. Para pekerja ini akan dialokasikan ke berbagai sektor, seperti 60.000 pekerja di sektor jasa perhotelan, 40.000 di industri makanan, 36.500 di sektor pertanian, 37.000 di layanan kebersihan gedung, 53.000 di layanan makanan, 34.000 di industri minuman dan makanan, serta 22.000 di sektor penginapan dan hotel. Revisi Undang-Undang Kontrol Imigrasi ini menciptakan status visa baru, dimana Jepang tidak lagi hanya menerima tenaga kerja asing dengan keterampilan khusus dan profesional. Akan tetapi revisi ini membuka kesempatan bagi pekerja asing yang tidak terampil dan menciptakan ketegangan sosial dan ancaman identitas nasional akibat lonjakan arus imigran yang semakin tinggi (Fauzan dan Paramasatya 2022, 242).

Pemerintah Jepang di era PM Shinzo Abe dalam kebijakan imigrasinya cenderung memprioritaskan ekonomi dalam menangani fenomena *shoushika*. Sehingga mengakibatkan fenomena *shoushika* semakin memburuk dan menciptakan permasalahan baru yaitu ancaman identitas nasional akibat kebijakan yang

mempermudah masuknya imigran. Kemudian, Pada tahun 2021 Jepang kembali merancang RUU Amandemen Kontrol Imigrasi dan Pengungsi atau yang disebut ICRRA. Amandemen ini mencakup perubahan pada pasal 39 dan 52 Namun, amandemen yang diajukan belum berhasil disahkan karena dinilai akan mengizinkan penahanan imigran tanpa batas waktu dan mempermudah deportasi bagi pengungsi yang gagal mendapatkan izin tinggal yang akan menciptakan pelanggaran HAM. Serta semakin memperketat aturan pengajuan status sebagai pengungsi (Theresia 2024, 13).

Dalam mengatasi ancaman identitas nasional akibat fenomena *shoushika*, PM Fumio Kishida dalam pidatonya menyampaikan upaya dengan rencana menciptakan “kapitalisme baru” untuk mempertahankan perekonomiannya yang berfokus pada kenaikan upah pekerja, pengembangan inovasi dan penyelesaian permasalahan sosial seperti fenomena *shoushika* melalui penguatan ekonomi dengan mendukung perusahaan-perusahaan yang baru merintis. Upaya ini dilakukan oleh PM Fumio Kishida untuk meningkatkan tenaga kerja domestik dengan menarik perhatian penduduk Jepang. Bahkan, Pemerintah Jepang membuat kebijakan yaitu memperpanjang masa pensiun bagi pekerja lanjut usia. Akan tetapi, upaya tersebut belum berhasil meningkatkan angka kelahiran dan belum berhasil mengatasi kebutuhan tenaga kerja yang mendesak di Jepang. Sehingga, pemerintah Jepang membutuhkan penyelesaian yang tanggap untuk mengatasi fenomena *shoushika* yang berdampak besar pada kebutuhan tenaga kerja melalui kebijakan imigrasi Jepang (antaranews.com 2023).

Pemerintah Jepang terus berupaya melalui amandemen kebijakan imigrasi internasional karena kondisi fenomena *shoushika* yang semakin memburuk

mengancam identitas nasional Jepang akibat masuknya imigran dengan jumlah besar ke Jepang. Dimana pada tahun 2023, Jepang kembali mengajukan amandemen RUU kebijakan imigrasi internasional dengan berlandaskan perintah kabinet tahun 1951. Pengajuan amandemen kebijakan imigrasi internasional ini berhasil disahkan pada Juni 2024. Pemerintah Jepang mengesahkan amandemen Kebijakan imigrasi yang disebut dengan UU kontrol imigrasi dan pengakuan pengungsi yang membawa sejumlah perubahan signifikan dan memperketat aturan imigran termasuk pengajuan status pengungsi (Naoto 2023).

Selain itu, UU yang diperbarui juga memperkenalkan kontrol yang lebih ketat terhadap status penduduk tetap. Ketentuan baru memungkinkan otoritas imigrasi mencabut status penduduk tetap dari individu yang berulang kali gagal memenuhi kewajiban mereka seperti tidak membayar pajak, asuransi sosial, atau yang telah dihukum atas kejahatan tertentu. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penduduk tetap mematuhi hukum Jepang dan berkontribusi secara positif terhadap penduduk (Higuchi, Inaba, Takaya 2024).

Pengetatan kebijakan kontrol imigrasi dan pengungsi di Jepang yang disahkan oleh PM Fumio Kishida meliputi, Pembatasan Pengajuan Status Pengungsi, Pencabutan status penduduk tetap, Penerimaan tenaga kerja asing yang selektif melalui Sistem Specified Skilled Worker (SSW). Dalam sistem SSW I diperuntukan untuk pekerja semi terampil di 14 sektor dengan maksimal izin tinggal 5 tahun. Sedangkan SSW II diperuntukan bagi pekerja berketerampilan tinggi di 12 sektor dan dapat membawa keluarga serta mengajukan izin tinggal tetap di Jepang. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah Jepang untuk mengelola keberadaan tenaga kerja

asing dan penduduk tetap secara lebih ketat sekaligus menjaga stabilitas sistem sosial dan hukum di tengah meningkatnya jumlah pekerja migran dan ancaman akan identitas nasional Jepang. Kurangnya tenaga kerja domestik dengan usia produktif akibat fenomena *shoushika* menciptakan dilema bagi Jepang. Dilema muncul terkait ancaman keamanan, ekonomi, sosial dan kekhawatiran penduduk Jepang terhadap masuknya budaya asing yang bisa mengancam homogenitas mereka yang menjadi dasar akan identitas nasional Jepang. Untuk mengatasinya, pemerintah Jepang berupaya melakukan pengawasan imigrasi melalui amandemen kebijakan imigrasi atau UU Kontrol Imigrasi dan Pengungsi yang disahkan pada tahun 2024 serta sebagai upaya menghadapi fenomena *shoushika* (Theresia 2024, 10).

BAB 3

KEBIJAKAN IMIGRASI JEPANG DALAM MENGATASI ANCAMAN IDENTITAS NASIONAL MELALUI TEORI KEBIJAKAN IMIGRASI INTERNASIONAL

3.1 Pendekatan Identitas Nasional Dalam Kebijakan Imigrasi Internasional Jepang Untuk Mengatasi Ancaman Identitas Nasional Tahun 2021-2024.

Identitas nasional merupakan pendekatan dalam teori kebijakan imigrasi internasional yang dikemukakan oleh Eytan Meyers. Eytan Meyers berpendapat bahwa, Pendekatan identitas nasional sangat mempengaruhi kebijakan imigrasi suatu negara yang dibentuk oleh sejarah yang unik, seperti pemahaman tentang kewarganegaraan, nasionalisme, dan diskusi mengenai identitas nasional serta konflik sosial internal. Dalam pendekatan identitas nasional mengkaji tradisi, warisan sejarah dan idiom budaya serta ketegangan sosial membentuk kerangka berpikir yang mempengaruhi kebijakan suatu negara. Menurut Eytan Meyers, kebijakan imigrasi Jepang tidak berkembang secara mandiri. Akan tetapi, dipengaruhi oleh sejarah dan perdebatan identitas nasional (Meyers 2000, 1251).

3.1.1 Homogenitas Jepang

Jepang merupakan negara yang membentuk kebijakan imigrasi berdasarkan konflik sosial dan perdebatan tentang identitas nasional. Dimana Jepang dikenal sebagai negara yang identik dengan penduduk yang homogen dengan kewaspaan terhadap masuknya imigran. Homogenitas Jepang merupakan fondasi identitas

nasional Jepang. Karena, sebelum terjadinya Restorasi Meiji pada tahun 1968, Jepang merupakan negara yang tertutup selama 200 tahun dengan menerapkan kebijakan isolasi negara (*Sakoku*). Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan PM Nakasone Yasuhiro pada tahun 1986, yang menyebut bahwa "*Japan is a homogeneous natural community*" atau Jepang sebagai komunitas yang homogen (Widiandari 2021, 249).

Homogenitas Jepang mengakar pada tradisi dan budaya Jepang yang unik. Tradisi yang kuat di Jepang telah bertahan sejak ribuan tahun lalu. Dalam kehidupan sehari-hari penduduk Jepang sangat erat dengan budaya dan tradisi Jepang dan telah dikenal luas di seluruh dunia. Budaya seperti bahasa, pakaian kimono, tradisi minum teh bersama, dan berbagai budaya lainnya sangat dihargai oleh penduduk Jepang. Budaya Jepang sangat menekankan nilai-nilai keharmonisan sosial dan etos kerja yang tinggi. Meskipun sejak masa restorasi Meiji terjadi modernisasi yang dipengaruhi oleh masuknya budaya Barat ke Jepang, penduduk Jepang tetap berusaha keras untuk mempertahankan dan melestarikan warisan budaya mereka yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu (Inside Japan Tours, n.d.).

Kuatnya budaya dan tradisi pada penduduk Jepang didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Jou (2014) "Budaya Jepang merupakan sistem yang kompleks dan berlapis. Budaya Jepang telah berkembang secara internal dan membentuk lapisan-lapisan baru selama ribuan tahun. Secara tradisional, orang Jepang sangat menekankan konsep '*wa*' atau keharmonisan kelompok. Kebajikan bersama dianggap lebih utama daripada pemenuhan kebutuhan individu. Prinsip ini

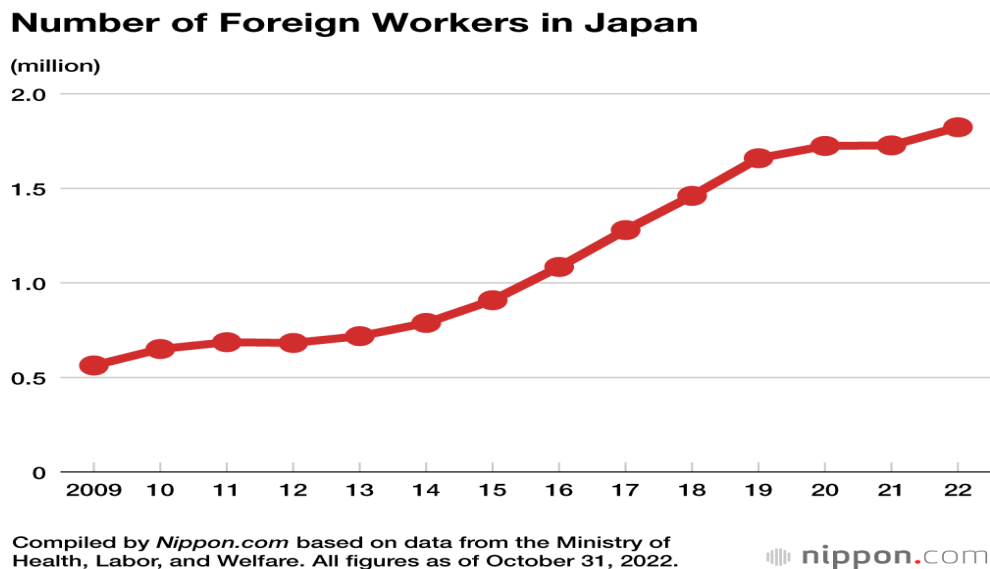
diterapkan di sekolah, kelompok sosial, dan di dunia kerja” (Adha dan Susanto 2020, 346).

Sejak abad ke-19, Jepang merupakan salah satu negara di Asia yang telah melindungi seni, budaya, tradisi dan monumen bersejarah melalui undang-undang nasional. Upaya ini merupakan inisiatif negara tanpa pengaruh kekuatan asing. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap pengaruh barat di era Restorasi Meiji, dengan tujuan memperkuat identitas nasional Jepang dalam upaya pembangunan bangsa. Sejak saat itu, UU terkait konservasi seni dan monumen terus diperbarui untuk melindungi budaya nasional sesuai pandangan pemerintah. Bahkan, Jepang mengatur UU perlindungan warisan sejarah secara detail dalam kebijakan negaranya. Dimana Jepang menambahkan dua kategori baru dalam kebijakan negaranya, yaitu Properti Budaya Rakyat Tak Benda pada 1954 dan Teknik Tradisional untuk Konservasi properti budaya pada 1975. Pendekatan unik ini membuat Jepang diakui berperan penting dalam merancang pedoman konservasi budaya internasional (Akagawa 2014, 10).

Menurut Eytan Meyers kebijakan imigrasi Jepang yang diamandemen oleh PM Fumio Kishida dibentuk oleh sejarah yang unik dalam identitas nasional negara. Identitas nasional Jepang dipahami melalui *Nihonjinron*. *Nihonjinron* merupakan literatur yang berkembang pada 1970-an dan 1980-an yang menekankan keunikan Jepang. *Nihonjinron* memiliki empat prinsip utama yaitu, Pertama Homogenitas yang menekankan keunikan dan keseragaman budaya Jepang. Kedua Darah, yang beranggapan pentingnya komunikasi timbal balik untuk saling pengertian dan memahami identitas budaya Jepang. Ketiga Kompetensi budaya, yaitu pandangan

bahwa orang asing sulit memahami budaya dan bahasa Jepang secara mendalam. Dan Keempat Partisipasi sosial, yang membatasi keterlibatan orang asing dalam berbagai bidang seperti pencari suaka, perkawinan, pekerjaan, dan kepemimpinan untuk melindungi budaya Jepang (Pratiwi 2014, 1189).

Gambar.2 Jumlah Tenaga Kerja Asing di Jepang



Sumber : (Nippon.com 2023)

Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang menunjukkan bahwa pada Oktober tahun 2022 jumlah tenaga kerja asing di Jepang mencapai angka tertinggi sepanjang masa yakni 1.822.725 orang. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 5,5% dibandingkan tahun sebelumnya dengan peningkatan 95.000 tenaga kerja asing. Jumlah tenaga kerja asing di Jepang hampir 60% didominasi oleh pekerja migran dengan kewarganegaraan Vietnam, Tiongkok (termasuk Hong Kong dan Makau), dan Filipina. Pekerja Vietnam berjumlah 462.384 orang (25,4% dari total), Tiongkok 385.848 orang (21,2%), dan

Filipina 206.050 orang (11,3%). Dan Brasil yang memiliki banyak keturunan Jepang menyumbang 135.167 pekerja (7,4%). Negara dengan peningkatan terbesar dari tahun ke tahun adalah Indonesia (77.889 orang, naik 47,5%), Myanmar (47.498 orang, naik 37,7%), dan Nepal (118.196 orang, naik 20,3%). Berdasarkan status kependudukan, 32,7% tenaga kerja asing memiliki visa dengan status sebagai penduduk tetap atau pasangan dari warga negara Jepang. Sedangkan, 26,3% lainnya memegang visa yang didasarkan pada profesi atau keahlian teknis mereka. Jumlah peserta pelatihan magang teknis yaitu 18,8% dan mahasiswa atau individu yang bekerja dengan ketentuan pengecualian diizinkan atas status kependudukan mereka yaitu sebanyak 18,2% (Nippon.com 2023).

Berdasarkan pendekatan identitas nasional oleh Eytan Meyers, dalam proses amandemen pengetatan kebijakan imigrasi Jepang yang diajukan pada tahun 2023 dan disahkan pada Juni 2024 telah mempertimbangkan aspek-aspek kepentingan nasional dan identitas nasional Jepang. Karakteristik Jepang yang kuat dengan homogenitas menjadikan identitas nasional sebagai determinan utama dalam proses amandemen kebijakan imigrasi internasional. Fenomena *shoushika* menjadi permasalahan yang semakin kompleks yang mengancam identitas nasional Jepang. Menurunnya populasi Jepang merupakan tantangan demografis yang tidak dapat diatasi hanya dengan kebijakan sosial yang terisolasi. Meningkatnya populasi orang asing baik pekerja migran dan pengungsi di Jepang secara terus menerus menciptakan kekhawatiran terhadap identitas nasional Jepang yang menciptakan ketegangan sosial Jepang. Dimana Jumlah penduduk asing di Jepang meningkat lebih tajam selama beberapa dekade terakhir. Karena meningkatnya imigran seperti pengungsi dan

tenaga kerja asing berpotensi mempercepat penyebaran multikulturalisme dan pemerintah Jepang khawatir imigran semakin mendominasi di Jepang. Dan pemerintah Jepang khawatir kebijakan imigrasi yang terbuka dan masih diterapkan akan menyebabkan masuknya agen partai komunis dan pengaruh asing lainnya. Per Oktober 2023 terdapat lebih dari 2 juta pekerja asing di Jepang. Tingginya kebutuhan akan tenaga kerja di Jepang menciptakan dilema antara harus mempertahankan identitas nasional yang kuat atau menerima keberadaan imigran yang terus bertambah dan memainkan peran penting dalam komposisi tenaga kerja di Jepang (Harrison 2023).

Berdasarkan pendekatan identitas nasional oleh Eytan Meyers, Pengetatan kebijakan imigrasi dan pengungsi yang dilakukan oleh PM Fumio Kishida terbentuk dengan adanya perdebatan akan identitas nasional. Perdebatan terjadi akibat semakin meningkatnya tenaga kerja asing yang masuk ke Jepang untuk mengisi kekosongan sektor perekonomian Jepang. Akan tetapi, hal ini terjadi pertentangan antara homogenitas yang menjadi fondasi identitas nasional Jepang dengan multikulturalisme yang terus menyebar melalui imigran. Kuatnya identitas nasional Jepang membuat PM Fumio Kishida melakukan pengetatan kebijakan imigrasi dan pengungsi untuk menekan jumlah imigran sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan kriteria yang sudah ditetapkan (Burgess 2024).

Amandemen kebijakan imigrasi Jepang yang semakin diperketat diberlakukan pada tahun 2024 bertujuan untuk menghentikan program pelatihan magang teknis yang kontroversial, Jepang memperkenalkan inisiatif baru yang disebut Program Kerja Pelatihan untuk merekrut tenaga kerja asing. Dan amandemen kebijakan

imigrasi internasional Jepang menerapkan pengawasan yang lebih ketat terhadap status penduduk tetap yang diberikan kepada penduduk asing di Jepang. Kebijakan imigrasi internasional Jepang ini dinilai semakin ketat dan membatasi imigran yang akan masuk ke Jepang termasuk pengajuan status pengungsi. Dimana, menurut Eytan Meyers kebijakan imigrasi Jepang dibentuk oleh perdebatan identitas nasional. Resistensi politik terhadap imigrasi di Jepang mencerminkan kuatnya pengaruh identitas nasional dalam membentuk kebijakan imigrasi. Dengan komitmen menjaga homogenitas budaya, Jepang kembali menerapkan aturan ketat bagi imigran (Higuchi, Inaba, Takaya 2024).

Bahkan, UU imigrasi internasional ini semakin mempermudah Jepang untuk melakukan deportasi bagi orang-orang yang gagal memperoleh suaka. Sesuai dengan perubahan UU Imigrasi yang diberlakukan, Pemerintah Jepang dapat melakukan deportasi kepada pengungsi yang permohonannya telah tertolak sebanyak tiga kali. Hal ini berbeda dengan peraturan sebelumnya yang memperbolehkan pengungsi untuk tetap tinggal di Jepang selama proses banding, tanpa memperhatikan jumlah permohonan yang diajukan. Langkah ini dilakukan Jepang untuk mencegah penyebaran multikulturalisme dan ancaman identitas nasional Jepang terutama homogenitas Jepang yang akan menciptakan ketegangan sosial akibat jumlah pengungsi yang semakin meningkat (Higuchi, Inaba, Takaya 2024).

3.1.2 Etnonasionalisme Jepang

Jepang merupakan negara di Asia Timur yang sering disebut sebagai negara imigran etno-nasionalisme. Identitas nasional Jepang yang kuat mengedepankan

homogenitas budaya dan garis keturunan bersama. Pasca Perang Dunia II, pandangan ini menguat dengan pendekatan yang menghubungkan kebangsaan Jepang pada kemurnian ras dan budaya. Pandangan ini diperkuat oleh berbagai dukungan kalangan intelektual baik para pembuat kebijakan dan perekonomian Jepang dengan menjadikan identitas nasional sebagai bagian penting dalam sistem sosial Jepang. Sejak 1980-an kehadiran imigran di Jepang terus meningkat, langkah-langkah untuk mengintegrasikan mereka melalui kebijakan imigrasi Jepang sering kali memperkuat identitas nasional Jepang yang menciptakan perbedaan antara “orang Jepang” dan “orang asing.” Perbedaan ini menciptakan ketegangan sosial antara penduduk Jepang dengan Imigran. Kebijakan imigrasi Jepang di era PM Fumio Kishida cenderung mengedepankan identitas nasionalnya, Fenomena *Shoushika* tidak menjadi penghalang dalam pembatasan imigran secara tidak langsung dan kuatnya etno-nasionalisme Jepang menghalangi integrasi antara penduduk Jepang dan Imigran. (Liu-Farrer 2024, E1).

Fenomena *shoushika* yang terjadi di Jepang berdampak pada kebijakan imigrasi di era PM Shinzo Abe yang melonggarkan masuknya imigran. Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang pada Jumat, 2 Februari 2024 menunjukkan bahwa angka ini telah meningkat tiga kali lipat dalam satu dekade terakhir dengan pertumbuhan sebesar 12,4% dibandingkan tahun sebelumnya. masuknya imigran dalam jumlah besar yang menciptakan keberagaman etnis serta mempercepat penyebaran multikulturalisme dalam penduduk Jepang yang selama ini dikenal dengan homogenitasnya (Yokoyama 2024).

Sehingga , pada masa pemerintahan PM Fumio Kishida terjadi pengetatan kebijakan imigrasi yang disahkan pada tahun 2024. Jepang menghadapi tantangan besar dalam mengatasi ancaman identitas nasional akibat penyebaran multikulturalisme dengan meningkatnya jumlah imigran. Jepang yang selama ini mempertahankan citra masyarakat homogen, kini mengalami peningkatan tajam dalam migrasi internasional terutama dari negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Lonjakan ini sebagian besar dipicu oleh kebutuhan tenaga kerja akibat krisis demografi, yaitu penuaan populasi (*shoushika*) dan kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu seperti konstruksi, perawatan, dan pertanian. Namun, PM Fumio Kishida sebagai pemerintah Jepang cenderung mengadopsi pendekatan yang pragmatis dan terbatas dengan mengedepankan identitas nasional Jepang. Program seperti pelatihan magang peserta dan visa kerja spesifik melalui Skilled Worker Type 1 (SSW1) dan Specified Skilled Worker Type 2 (SSW2) tidak dirancang untuk integrasi jangka panjang para imigran. Mereka diperlakukan sebagai pekerja sementara dengan batas waktu tertentu, bukan penduduk yang berpotensi menjadi bagian tetap dari masyarakat Jepang (Burgess 2024).

Etnonasionalisme Jepang adalah pandangan yang mengutamakan homogenitas etnis dan budaya sebagai fondasi identitas nasional. Konsep ini didukung oleh narasi historis bahwa Jepang adalah bangsa yang terdiri dari satu etnis (Yamato), satu bahasa, dan satu budaya. Perspektif ini telah menjadi dasar kebijakan publik Jepang selama bertahun-tahun, termasuk dalam kebijakan imigrasi. Melalui undang-undang imigrasi yang disahkan pada Juni 2024, pemerintah memiliki

wewenang untuk mencabut status penduduk tetap. Perdana Menteri Fumio Kishida juga memberlakukan pembatasan pengajuan status pengungsi untuk memprioritaskan harmonisasi sosial penduduk Jepang. Ketidakmampuan Jepang untuk beradaptasi dengan multikulturalisme dipengaruhi oleh ketakutan bahwa peningkatan jumlah migran akan mengganggu harmonisasi sosial dan mengancam identitas nasional. Dalam pandangan etnonasionalisme, imigran sering kali dianggap sebagai "orang luar" (*gaikokujin*) yang sulit diterima secara penuh sebagai penduduk Jepang. Hal ini tercermin dalam kebijakan imigrasi Jepang yang ketat melalui visa dan program sementara, di mana pemerintah Jepang lebih memilih untuk mendatangkan tenaga kerja dengan visa terbatas daripada mengizinkan imigrasi permanen (Burgess 2024).

Berdasarkan identitas nasional Jepang yang dijelaskan dalam empat prinsip *nihonjinron*. Setelah Perang Dunia II, Konstitusi Jepang menetapkan bahwa kewarganegaraan didasarkan pada prinsip "hubungan darah" atau kekerabatan selaras dengan prinsip yang tertuang pada *nihonjinron*. Hal Ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Eytan Meyers bahwa Jepang merupakan negara dengan sejarah yang unik, berbeda dengan negara seperti Kanada yang memberikan kewarganegaraan kepada siapa saja yang lahir di negara tersebut. Kewarganegaraan Jepang hanya bisa diperoleh jika salah satu orang tua adalah warga negara Jepang. Kewarganegaraan tidak diberikan otomatis kepada anak yang lahir di Jepang, kecuali jika orang tua mereka adalah warga negara Jepang atau memenuhi persyaratan tertentu. Meskipun proses naturalisasi memungkinkan orang asing untuk menjadi warga negara Jepang. Akan tetapi, jumlah yang menjalani proses ini sangat rendah,

dimana hanya 866 orang yang berhasil dinaturalisasi pada tahun 2022. Salah satu alasan rendahnya jumlah naturalisasi adalah larangan kewarganegaraan ganda di Jepang. Larangan ini mengharuskan individu melepaskan kewarganegaraan asal mereka untuk menjadi warga negara Jepang (Harrison 2023).

Ideologi yang mengakar kuat mengenai homogenitas Jepang memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan identitas nasional, realitas sosial, serta kebijakan publik. Ideologi ini berperan sentral dalam mendefinisikan siapa yang dianggap sebagai orang Jepang dan siapa yang bukan. Jepang sering digambarkan sebagai negara "tanpa imigrasi", karena wacana etnonasionalisme secara konsisten menjadi penghalang bagi integrasi sosial para imigran dan menghambat pengembangan infrastruktur pendukung yang memadai untuk masyarakat multikultural. Meskipun demikian, sistem Specified Skilled Worker (SSW) tipe 2 yang baru menandai awal dari upaya untuk mengikis ideologi homogenitas ini. Namun kenyataannya, hingga Desember 2023 hanya 37 migran yang berhasil memenuhi persyaratan ketat untuk memperoleh status SSW2. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk membuka pintu bagi tenaga kerja asing. Akan tetapi kuatnya etnonasionalisme Jepang menciptakan proses yang masih sangat selektif dan terbatas dalam penerimaan imigran.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Eytan Meyers, Pendekatan Identitas Nasional dalam Kebijakan Imigrasi Internasional Jepang untuk mengatasi ancaman identitas nasional tahun 2021-2024 sangat mengedepankan budaya, tradisi, warisan sejarah, dan ketegangan sosial sebagai acuan dalam membentuk kebijakan imigrasi.

Globalisasi dan modernisasi yang membawa pengaruh barat di Jepang telah mengancam identitas nasional Jepang. Ancaman terhadap identitas nasional ini mendorong munculnya nasionalisme kultural yang telah lama ada di Jepang. Dengan prinsip-prinsip *nihonjinron* yang kuat mendorong penduduk dan elit politik Jepang untuk membatasi imigrasi. Hal ini dilakukan Jepang untuk mempertahankan penduduk yang homogen dan menjaga nilai-nilai identitas nasional yang harus tetap terjaga keasliannya dan tidak terpengaruh oleh orang asing (Pratiwi 2014).

3.1.3 Ketegangan sosial Jepang

Masyarakat Jepang dikenal sebagai masyarakat yang damai, patuh, dan lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nilai-nilai ini tercermin dalam konsep *wa*, yang menjadi norma sosial yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. *Wa* diartikan sebagai standar perilaku yang harus diikuti oleh setiap orang, dan didukung oleh tekanan sosial yang kuat. Konsep ini diajarkan kepada anak-anak sejak dini melalui pendidikan karakter di sekolah dan terus diterapkan hingga mereka memasuki dunia kerja. Seseorang yang melanggar prinsip *wa* untuk kepentingan pribadi akan menghadapi konsekuensi. Penerapan konsep *wa* menjadikan masyarakat Jepang cenderung bersikap tertib dan baik.

Namun, homogenitas masyarakat Jepang menghadapi tantangan serius yang menciptakan ketegangan sosial akibat lonjakan imigrasi dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan jumlah imigran membawa dinamika baru yang dapat mempengaruhi norma dan prinsip tradisional masyarakat Jepang termasuk *wa* yaitu keharmonisan sosial. Perbedaan budaya dan nilai yang dibawa oleh imigran kadang

bertentangan dengan kebiasaan lokal yang dapat memicu konflik sosial atau pelanggaran norma. Selain itu, imigran sering kali melakukan pelanggaran hukum atau norma di Jepang. Hal ini memperkuat kekhawatiran terhadap ancaman identitas nasional, karena homogenitas yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Jepang semakin memudar.

Jepang merupakan negara dengan identitas nasional yang kuat dan menekankan harmonisasi sosial. Permasalahan fenomena *shoushika* yang dihadapi Jepang menciptakan tekanan dalam negeri terhadap pemerintah Jepang. Ditengah menurunnya populasi penduduk di Jepang, Gelombang imigrasi Jepang semakin meningkat setiap tahunnya. Akibat kebutuhan tenaga kerja yang mendesak, Jepang yang sebelumnya selektif kini lebih terbuka menerima tenaga kerja asing melalui UU kontrol imigrasi tahun 2019 sebagai upaya mengatasi kurangnya tenaga kerja domestik akibat fenomena *shoushika*. Akan tetapi, kebijakan imigrasi tahun 2019 yang diterapkan sampai tahun 2023 menciptakan ketegangan sosial akibat melonjaknya tenaga kerja asing di Jepang (Milly 2020).

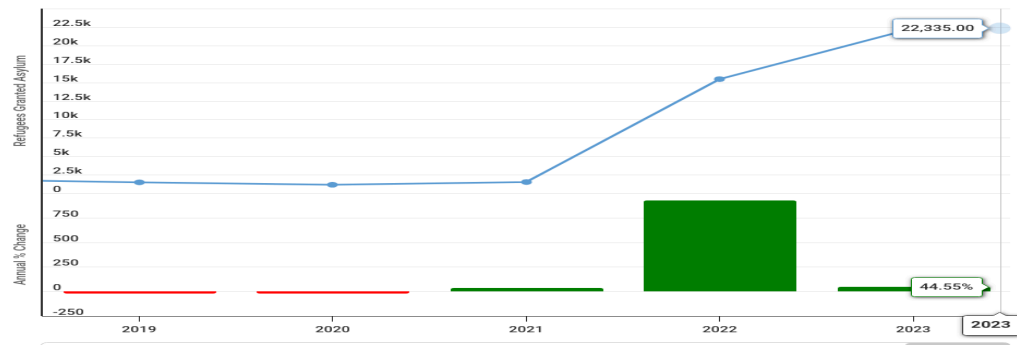
Mendominasinya penduduk lanjut usia menciptakan permasalahan ekonomi, dimana berkurangnya jumlah penduduk usia kerja telah menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang bersifat struktural dan kronis di berbagai sektor ekonomi. Kurangnya tenaga kerja mengakibatkan Jepang terancam akan mengalami stagnasi ekonomi. Peningkatan permintaan tenaga kerja memaksa Jepang untuk menerima tenaga kerja asing dalam jumlah besar demi menjaga produktivitas perekonomian nasional. Namun, langkah ini menimbulkan kekhawatiran akan ancaman terhadap kepentingan penduduk Jepang yaitu homogenitas budaya Jepang yang selama ini

menjadi pondasi identitas nasional. Hal ini dianggap akan mengikis nilai-nilai tradisional Jepang. Gelombang imigrasi yang tinggi dapat menciptakan ketegangan sosial pada penduduk Jepang dan meningkatkan potensi kriminalitas semakin tinggi (Liu-Farrer 2024, E2).

Kehadiran tenaga kerja asing memberikan kontribusi signifikan pada stabilitas perekonomian Jepang. Namun, peningkatan jumlah imigran akibat kebutuhan tenaga kerja asing yang mendesak dan penerimaan pengungsi menciptakan ancaman identitas nasional akibat munculnya sejumlah permasalahan imigran. Beberapa diantaranya meliputi pelanggaran hukum, penyalahgunaan izin tinggal, tidak membayar pajak, atau melakukan pelanggaran kewajiban asuransi sosial. Bahkan, kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan lainnya dilakukan oleh imigran di Jepang (The Organized Crime Global Index 2023).

Melalui kebijakan imigrasi, Pemerintah mengantisipasi peningkatan jumlah penduduk tetap dan pengungsi secara drastis. Menurut Eytan Meyers, perubahan kebijakan imigrasi yang disahkan pada tahun 2024 merupakan upaya mengatasi ancaman identitas nasional akibat fenomena *shoushika* dengan mengedepankan identitas nasional Jepang dengan memperketat pengawasan terhadap status penduduk tetap dan pelanggaran imigrasi. Berdasarkan Amandemen kebijakan imigrasi atau UU kontrol imigrasi dan pengungsi yang disahkan pada tahun 2024, Pemerintah Jepang memiliki otoritas penuh dalam kebijakan imigrasi melalui wewenang pencabutan status penduduk tetap dan deportasi bagi penduduk yang tidak membayar pajak atau asuransi sosial, atau melakukan pelanggaran hukum tertentu (Higuchi, Inaba, Takaya 2024).

Gambar.3 Data Statistik Pengungsi di Jepang Tahun 2019-2023



Sumber : (Macrotrends 2023)

Berdasarkan data, Jepang merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, hal ini menunjukkan komitmen Jepang sebagai negara penerima pengungsi. Fenomena *shoushika* mendorong lonjakan arus imigran akibat kebutuhan tenaga kerja domestik diikuti dengan jumlah pengungsi terus meningkat dari 1.132 orang pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.508 orang pada tahun 2021 dan melonjak menjadi 15.451 orang pada tahun 2022 serta mencapai 22.335 orang pada 2023 dari tahun sebelumnya (Macrotrends 2023).

Dalam amandemen kebijakan imigrasi atau Undang-undang kontrol imigrasi dan pengungsi yang disahkan pada tahun 2024, Pemerintah Jepang memperketat aturan penerimaan pengungsi. Pertama, Pemerintah Jepang merubah definisi penetapan status pengungsi yaitu, WNA yang dianggap pengungsi merupakan WNA yang menghadapi penganiayaan SARA, diskriminasi, atau perbedaan politik, sementara korban konflik tidak diakui. Pengungsi yang diterima dapat bekerja dan menerima dana pensiun. Kedua, Pemerintah Jepang membatasi pengajuan status pengungsi. Pencari suaka yang melebihi batas tiga kali pengajuan status pengungsi

akan dideportasi. Ketiga, WNA dengan status pengungsi yang sudah tidak berlaku akan ditahan di fasilitas khusus, dengan masa penahanan yang dapat diperpanjang jika prosedur deportasi tertunda. Melalui kebijakan ini, Pemerintah Jepang berupaya untuk mencegah masuknya imigran dalam jumlah besar yang dianggap dapat mengancam stabilitas sosial dan identitas nasional. Kriteria untuk mendapatkan status pengungsi dibuat lebih ketat, sehingga hanya sedikit imigran yang berhasil memenuhi persyaratan (Theresia 2024).

Meskipun, Kebijakan imigrasi ini ditentang oleh berbagai pihak yaitu partai oposisi dari Partai Demokrat Konstitusi Jepang (CDP) dan Partai Komunis Jepang. Akan tetapi, Berdasarkan pendekatan identitas nasional amandemen kebijakan imigrasi dilakukan oleh pemerintah Jepang dengan mengedepankan identitas nasional Jepang yang menekankan harmonisasi sosial didukung oleh partai Demokrat Liberal (LDP), mitra koalisi nya Komeito, dan Partai Inovasi Jepang (Nippon Ishin). Hal ini ditegaskan oleh Kementerian Kehakiman, menyatakan bahwa kebijakan imigrasi yang diamandemen merupakan upaya pemerintah untuk menekan pelanggaran imigrasi dengan penyalahgunaan izin tinggal yang seringkali dimanfaatkan khususnya oleh pengungsi. Pembatasan pengajuan status pengungsi yang diatur dalam UU kontrol imigrasi dan pengungsi dilakukan untuk menciptakan harmonisasi sosial dengan menekan arus imigran dan menjaga stabilitas sosial dengan memastikan kebijakan imigrasi tetap sejalan dengan identitas nasional Jepang (Theresia 2024, 18).

Disahkannya amandemen UU Kontrol Imigrasi dan Pengungsi pada Juni 2024 oleh PM Fumio Kishida sejalan dengan pendekatan identitas nasional oleh Eytan Meyers yang mengedepankan kepentingan nasional Jepang untuk mengatasi ancaman

identitas nasional dengan mengelola arus imigrasi akibat fenomena *shoushika*. Jumlah WNA yang masuk ke Jepang terus meningkat, mencakup pekerja migran, wisatawan, reunifikasi keluarga, dan pengungsi berdampak pada stabilitas sosial Jepang. Hal ini menciptakan kekhawatiran terhadap pelanggaran peraturan keimigrasian yang menciptakan ketegangan sosial dan mengancam harmonisasi sosial pada penduduk Jepang. Menurut data yang tercatat dalam situs resmi ISA, Lonjakan pelanggaran imigrasi terutama *overstay* yang mencapai 17.627 kasus pada tahun 2020 mendorong pemerintah untuk menerapkan prinsip *Zenken-Shuyo Shugi* (menahan semua pelanggar) untuk menegakkan aturan ICRRA dan memperketat kebijakan imigrasi Jepang (ISA 2021).

Menteri Kehakiman Jepang Ryuji Koizumi menjelaskan bahwa revisi undang-undang bertujuan untuk mempercepat proses deportasi bagi mereka yang tinggal tanpa izin serta mengurangi kasus penahanan jangka panjang. Kemudian ditegaskan kembali oleh Menteri Kehakiman Jepang Ryuji Koizumi bahwa individu yang membutuhkan perlindungan akan diberikan perlindungan yang layak, sementara mereka yang melanggar aturan akan menghadapi tindakan tegas. Kementerian Kehakiman menjelaskan bahwa tujuan revisi undang-undang ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat sekitar 3.000 orang asing yang menolak untuk dideportasi dengan tujuan untuk mencegah ketegangan sosial dengan menciptakan upaya-upaya harmonisasi sosial pada penduduk Jepang. (Agustina 2023).

Kebijakan imigrasi Jepang yang disahkan tahun 2024 merupakan upaya pengendalian dan penertiban WNA akibat fenomena *shoushika*. Lonjakan jumlah

WNA pemegang izin tinggal tetap berpotensi memicu pelanggaran hukum akibat celah dalam kebijakan imigrasi yang mengatur pencabutan izin tinggal. Persyaratan izin tinggal di Jepang diberikan kepada WNA yang telah menetap selama minimal 10 tahun dengan catatan hukum yang baik dan patuh membayar pajak. Sedangkan, kebijakan imigrasi sebelumnya pemerintah Jepang tidak memiliki wewenang untuk mencabut izin tinggal tetap bagi WNA yang tidak lagi memenuhi persyaratan. Pada Juni 2023, jumlah WNA yang memiliki izin tinggal tetap di Jepang mencapai 880.000 jiwa, sehingga dianggap berpotensi mengancam identitas nasional Jepang. (Gumiwang 2024).

Berdasarkan pendekatan identitas nasional oleh Eytan Meyers, Undang-Undang Kontrol Imigrasi dan Pengungsi tahun 2024 yang semakin ketat dirancang Jepang sebagai langkah strategis untuk melindungi identitas nasional dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum yang mendukung harmonisasi sosial serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai negara berdaulat, Jepang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan wilayah, stabilitas ekonomi-politik, serta nilai-nilai etnis, religius, sejarah, dan linguistik sebagaimana dijelaskan oleh Mas'oed (1994). Kekhawatiran yang muncul akibat lonjakan arus migran menjadi ancaman terhadap identitas nasional dan harmonisasi sosial Jepang merupakan kejahatan publik yang seringkali dilakukan oleh WNA. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Jepang dalam kebijakan imigrasi internasionalnya mencerminkan upaya nyata dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya.

Pemerintah Jepang secara konsisten enggan mengadopsi kebijakan imigrasi formal seperti negara-negara Amerika Serikat, Kanada, atau Australia sebagaimana ditegaskan oleh mendiang PM Shinzo Abe. Jepang menghadapi dilema besar antara kebutuhan mendesak akan tenaga kerja asing dan kekhawatiran terhadap perubahan struktur sosial, ekonomi dan identitas nasional. Dalam mengatasi fenomena *shoushika*, PM Fumio Kishida mengamandemen kebijakan imigrasi tahun 2024 yang memprioritaskan identitas nasional Jepang dengan kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan imigrasi melalui kebijakan yang tegas dan terbatas terhadap imigran. Hal ini sejalan dengan penolakan Jepang disebut sebagai "negara imigran" (Liu-Farrer 2024, E1).

Pertimbangan identitas nasional Jepang juga sangat mempengaruhi kebijakan imigrasi internasional yang telah ditetapkan. Berdasarkan pendekatan identitas nasional oleh Eytan Meyers, kebijakan imigrasi yang ditetapkan mengacu pada sejarah Jepang yang berdampak pada konflik sosial Jepang. Dimana, Sejarah ini mengacu pada kasus *Nikkeijin* (keturunan Jepang yang lahir di luar Jepang) menunjukkan betapa kuatnya nasionalisme dan kebudayaan Jepang. Meskipun memiliki latar belakang etnis yang sama, *Nikkeijin* sering mengalami penolakan dari penduduk dan pemerintah Jepang. Adanya perbedaan budaya mereka tetap dianggap sebagai orang asing yang menjadi penyebab terjadinya ketegangan sosial dan konflik etnis di Jepang. Kemiripan secara etnis tidak menjamin keharmonisan sosial. Perbedaan budaya membuat mereka ditolak karena dianggap mengganggu tatanan sosial. Meskipun Jepang sedang menghadapi Fenomena *Shouhsika* yang menyebabkan kekurangan tenaga kerja. Amandemen kebijakan imigrasi yang

disahkan pada Juni 2024 tetap dirancang secara ketat dengan memprioritaskan identitas nasional Jepang dan sejarah konflik internal yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran Jepang terhadap ancaman identitas nasional dengan keragaman etnis yang berdampak terhadap harmonisasi sosial penduduk Jepang (Pratiwi 2014).

Budaya Jepang sangat lekat dengan nilai-nilai tradisional yang diwariskan oleh para leluhurnya. Bahkan, Dalam upaya menjaga dan melestarikan warisan kebudayaan tersebut membuat penduduk Jepang enggan menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan bahasa menjadi hambatan komunikasi penduduk Jepang dengan imigran terutama tenaga kerja asing. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintahan Jepang menetapkan kebijakan pembatasan tenaga kerja asing dengan keterampilan khusus menguasai bahasa Jepang. Kehadiran tenaga kerja asing dianggap akan menjadi ancaman terhadap identitas nasional Jepang (Ministerial Conference on Acceptance and dan Coexistence of Foreign Nationals 2022).

Oleh karena itu, Berdasarkan pendekatan identitas nasional yang dikemukakan oleh Eytan Meyers menjelaskan bahwa identitas nasional menjadi komponen penting yang dipertimbangkan dalam proses amandemen kebijakan imigrasi Jepang yang disahkan pada Juni, 2024. Pertimbangan-pertimbangan yang ditekankan dalam penetapan kebijakan imigrasi melalui amandemen kebijakan imigrasi internasional dilakukan untuk menjaga identitas nasional Jepang dan memastikan nilai-nilai budaya serta jati diri bangsa tetap terpelihara di tengah dinamika global serta tantangan demografis yang dihadapi oleh Jepang (Meyers 2000).

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Rendahnya populasi penduduk dengan usia produktif akibat fenomena shoushika berdampak pada kurangnya tenaga kerja domestik Jepang di berbagai sektor penting mengancam keberlanjutan perekonomian negara yang berpotensi menyebabkan stagnasi ekonomi. Kondisi ini menciptakan arus tenaga kerja asing secara besar-besaran. Untuk mengatasi ini, PM Fumio Kishida melakukan pengetatan kebijakan imigrasi melalui amandemen kebijakan imigrasi internasional untuk mengatasi ancaman identitas nasional akibat fenomena shoushika dengan mengantisipasi lonjakan tenaga kerja asing dan pengungsi yang masuk ke Jepang melalui kebijakan imigrasi yang lebih ketat terhadap imigran yang mempengaruhi identitas nasional dan stabilitas sosial Jepang.

Dalam menjawab rumusan masalah, Penulis menggunakan teori Kebijakan imigrasi internasional yang dikemukakan oleh Eytan Meyers. Menurut Eytan Meyers dalam teori kebijakan imigrasi internasional terdapat satu pendekatan yang mempengaruhi Jepang melakukan pengetatan kebijakan imigrasi dalam mengatasi fenomena shoushika yaitu Pendekatan Identitas Nasional, Pendekatan identitas nasional oleh Eytan Meyers berpendapat bahwa kebijakan imigrasi suatu negara terbentuk berdasarkan sejarah yang unik. Homogenitas, budaya, sejarah dan tradisi yang unik menjadi komponen penting yang dipertimbangkan dalam proses pembentukan kebijakan imigrasi.

Jepang merupakan negara dengan identitas nasional yang kuat dengan prinsip *Nihonjinron* memprioritaskan perlindungan nilai-nilai tradisional dan keharmonisan sosial Jepang di tengah tantangan demografis Jepang yaitu fenomena *shoushika* yang berdampak pada kurangnya tenaga kerja domestik. Menurut pendekatan identitas nasional, pelanggaran imigrasi yang berlaku sampai tahun 2023 telah menciptakan ketegangan sosial yang mengancam identitas nasional Jepang. Jepang sangat menekankan nilai-nilai keharmonisan sosial dalam semua aspek kehidupan. Lonjakan imigran yang masuk ke Jepang menciptakan sejumlah permasalahan membuat harmonisasi sosial pada penduduk Jepang terganggu. Pemerintah Jepang khawatir lonjakan imigran baik tenaga kerja asing maupun pengungsi yang masuk akan mendominasi Jepang dan menghilangkan identitas nasional Jepang. Sehingga, dalam penetapan kebijakan imigrasi yang dilakukan oleh PM Fumio Kishida pada tahun 2024 merupakan langkah strategis untuk mengatasi ancaman identitas nasional Jepang dan untuk menciptakan harmonisasi sosial pada masyarakat Jepang untuk kepentingan bersama dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja asing dan penerimaan pengungsi untuk mempertahankan identitas nasional, stabilitas ekonomi dan stabilitas sosial Jepang.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan, Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan rekomendasi topik untuk ditinjau secara mendalam dalam penelitian selanjutnya, antara lain :

1. Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan terkait fokus analisis kebijakan hanya pada kebijakan imigrasi Jepang. Oleh karena itu, masih belum terlihat jelas upaya pemerintah Jepang untuk mengatasi fenomena shoushika melalui kebijakan lain secara efektif untuk meningkatkan angka kelahiran di Jepang. Penelitian ini belum menjelaskan upaya pemerintah untuk meningkatkan angka kelahiran secara mendalam. Karena dalam penelitian ini hanya berfokus dalam fenomena shoushika yang berdampak pada dinamika ekonomi dan sosial Jepang.
2. Penggunaan kerangka pemikiran melalui teori kebijakan imigrasi internasional dengan pendekatan identitas nasional yang dikemukakan oleh Eytan Meyers mempertajam analisis dengan fokus pengetatan kebijakan imigrasi Jepang di era PM Fumio Kishida. Sedangkan fenomena shoushika memiliki cakupan permasalahan yang luas. Sehingga, Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengadopsi kerangka pemikiran yang berbeda yang dapat memperdalam analisis pada implementasi atau efektivitas pengetatan kebijakan imigrasi dalam mengatasi ancaman identitas nasional terkait untuk memperkaya temuan mengenai permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Daring

- Adit, Albertus. 2024. "Populasi di Jepang Menurun, 6 Tahun ke Depan 'Kesempatan Terakhir.'" 2024.
<https://www.kompas.com/global/read/2024/09/06/153726770/populasi-di-jepang-menurun-6-tahun-ke-depan-kesempatan-terakhir>.
- Agustina, Dewi. 2023. "Pemerintah Jepang akan Ajukan Amandemen Undang-Undang Kontrol Imigrasi dan Pengungsi - TribunNews.com." 2023.
https://www.tribunnews.com/internasional/2023/01/12/pemerintah-jepang-akan-ajukan-amandemen-undang-undang-kontrol-imigrasi-dan-pengungsi#google_vignette.
- Amelia, Anggita. 2021. "5 Dampak yang Mengancam Jepang Akibat Fenomena Shoushika." 2021.
<https://www.idntimes.com/opinion/social/anggita-rezki-a/opini-5-dampak-yang-mengancam-jepang-akibat-fenomena-shoushika-clc2>.
- antaranews.com. 2023. "PM Jepang fokus naikan upah dalam kapitalisme model baru." Antara News. 29 Maret 2023
<https://www.antaranews.com/berita/3462711/pm-jepang-fokus-naikkan-upah-dalam-kapitalisme-model-baru>
- Aryaputraa. 2023. "Untuk Meningkatkan Angka Kelahiran, PM Jepang Tingkatkan Tunjangan Cuti untuk Mengasuh Anak." *Jurnal Patroli News* (blog). 18 Maret 2023.
<https://jurnalpatrolinews.co.id/internasional/untuk-meningkatkan-angka-kelahiran-pm-jepang-tingkatkan-tunjangan-cuti-untuk-mengasuh-anak/>.
- Asia, Nikkei. 2023. "Jepang mengesahkan RUU reformasi imigrasi: 4 hal yang perlu diketahui." Nikkei Asia. 2023.
<https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-immigration/Japan-passes-immigration-reform-bill-4-things-to-know>.
- BBC News Indonesia, BBC News Indonesia. 2018. "Populasi penduduk semakin tua, Jepang darurat tenaga kerja." *BBC News Indonesia*, 2018.
<https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-46650491>.
- Burgess, Chris 2024. "Multikulturalisme di Jepang gagal mengimbangi meningkatnya migrasi | East Asia Forum" 2024.
<https://eastasiaforum.org/2024/06/05/japans-multiculturalism-fails-to-keep-pace-with-rising-migration/>
- "Explore Japan." t.t. Diakses 1 Januari 2025.
https://www.id.emb-japan.go.jp/expljp_15.html.
- Furuya, Shoto. 2023. "Future Predictions 2040 in Japan: The Dawn of the Limited-Labor Supply Society - Inside Out." Recruit Holdings. 2023.
https://recruit-holdings.com/en/blog/post_20230926_0001/.
- Gumiwang, Muhamad Wildan, Ringkang. 2024. "WNA Tak Patuh Bayar Pajak di Jepang, Izin Tinggal Tetap Bakal Dicabut." *Berita Pajak Terkini*, Terpercaya

- di Indonesia dan Internasional. 2024. <https://news.ddtc.co.id/berita/internasional/1800850/wna-tak-patuh-bayar-pajak-di-jepang-izin-tinggal-tetap-bakal-dicabut>.
- Harrison, Scott Harrison, Scott. 2023. "Japan Needs More Labour. Is Immigration the Answer?" Asia Pacific Foundation of Canada. 2023. <https://www.asiapacific.ca/publication/japan-needs-more-labour-immigration-answer>.
- Hamaguchi, Keiichiro. 2019. "How Have Japanese Policies Changed in Accepting Foreign Workers?"
- Higuchi, Inaba, Takaya, Naoto, Nanako, Nachi. 2024. "Japan's Paradoxical Migration Policy | East Asia Forum." 16 Agustus 2024. <https://eastasiaforum.org/2024/08/16/japans-paradoxical-migration-policy/>.
- Indonesia, CNN Indonesia CNN. 2024. "Angka Kelahiran Jepang Tembus Rekor Terendah dalam 90 Tahun." 2024. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240228114706-113-1068195/angka-kelahiran-jepang-tembus-rekor-terendah-dalam-90-tahun>.
- ISA. 2021. "外国人在留総合インフォメーションセンター等 | 出入国在留管理庁." 2021. <https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html>.
- Japan, Nhk World Japan nhk world. 2022. "Seruan Untuk Mengatasi Anjloknya Tingkat Kelahiran Di Jepang | NHK WORLD-JAPAN News." NHK WORLD. 2022. <https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/id/news/backstories/2160/>.
- "Japanese Culture: Everything you need to know 2025/2026 | InsideJapan Tours." t.t. Diakses 2 Januari 2025. <https://www.insidejapantours.com/japanese-culture/>.
- Macrotrends. 2023. "Japan Refugee Statistics 1977-2025." 2023. <https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/jpn/japan/refugee-statistics>.
- Media, Kompas Cyber. 2024. "Populasi di Jepang Menurun, 6 Tahun ke Depan 'Kesempatan Terakhir.'" KOMPAS.com. 6 September 2024. <https://www.kompas.com/global/read/2024/09/06/153726770/populasi-di-jepang-menurun-6-tahun-ke-depan-kesempatan-terakhir>.
- Milly, Deborah J. 2020. "Japan's Labor Migration Reforms: Breaking with the Past?" Migrationpolicy.Org. 20 Februari 2020. <https://www.migrationpolicy.org/article/japan-labor-migration-reforms-breaking-past>.
- Naoto, Higuchi. 2023. "Japan's Incremental Immigration Reform: A Recipe for Failure | Nippon.com." 2023. <https://www.nippon.com/en/in-depth/d00920/>.
- Nippon.com, Nippon.com. 2023. "Record 1.8 Million Foreign Workers in Japan as of 2022." Nippon.Com. 16 Maret 2023. <https://www.nippon.com/en/japan-data/h01612/>.
- PAN, Xiaoye. 2024. "Immigration Policies and Social Equilibrium under the Widening Social Disparities in Japan - Google Search." 2024. https://www.google.com/search?q=Immigration+Policies+and+Social+Equilibrium+under+the+Widening+Social+Disparities+in+Japan&rlz=1C1GCEU_enID1019ID1019&oq=Immigration+Policies+and+Social+Equilibrium+under+the+Widening+Social+Disparities+in+Japan&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBgg

- [AEEUYOdIBBzOzNmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8.](#)
- “Population of Japan 2024 - PopulationPyramid.net.” t.t. Diakses 1 Januari 2025.
<https://www.populationpyramid.net/japan/2024/>.
- Prime Minister’s Office of Japan. 2023. “Ministerial Council on Acceptance and Inclusion of Foreign Human Resources.” Prime Minister’s Office of Japan. 2023. https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/actions/202306/09gaikoku.html.
- Saito, Juni. 2024. “Japan’s Immigration Policy: *de jure* and *de facto* | Japan Center for Economic Research.” 2024. <https://www.jcer.or.jp/english/japans-immigration-policy-de-jure-and-de-facto>
- says, YOJIMBO. 2023. “Why Won’t Kishida Adopt a Formal Immigration Policy? | East Asia Forum.” 23 November 2023. <https://eastasiaforum.org/2023/11/23/why-wont-kishida-adopt-a-formal-immigration-policy/>.
- The Organized Crime Global Index, Organized Crime Global Index. t.t. “Criminality in Japan - The Organized Crime Index.” Diakses 2 Januari 2025. <https://ocindex.net/>.
- Uddin, Islam. 2021. “Jepang batalkan RUU untuk revisi UU Imigrasi.” 2021. <https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/jepang-batalkan-ruu-untuk-revisi-uu-imigrasi-/2245655>.
- Xavier Rehm, Maximilien. 2022. “What Will Japan’s Great Reopening Mean for Immigration Policy?” 2022. <https://thediplomat.com/2022/11/what-will-japans-great-reopening-mean-for-immigration-policy/>.
- . 2024. “Reevaluating Japan’s Landmark Foreign Worker Reforms | East Asia Forum.” 14 Mei 2024. <https://eastasiaforum.org/2024/05/14/reevaluating-japans-landmark-foreign-worker-reforms/>.
- Yokoyama, Erica Momoka. 2024. “Japan’s Foreign Worker Tally Tops Two Million For First Time - Bloomberg.” 2024. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-26/japan-s-foreign-worker-tally-tops-two-million-for-first-time?sref=U3dOGIDF>.

Artikel Jurnal

- Adha, Muhammad Mona, dan Erwin Susanto. 2020. “Beyond Civilizational Dialogue, Nipponshi: Ruang Lingkup Identitas Nasional Bangsa Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5 (2): 340–47.
- Anggainsi, Sari, dan Kurniawaty Iskandar. 2022. “Detensi Imigrasi Berkepanjangan yang Bertentangan dengan HAM pada Fasilitas Detensi Imigrasi di Jepang: Tinjauan Perspektif Institusional.” *Jurnal HAM* 13 (3): 347. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.347-368>.
- Camelia Rabbayani, Chomsah. 2022. “DAMPAK FENOMENA SHOUSHIKA TERHADAP PEREKONOMIAN JEPANG.” Other, Unsada. <http://repository.unsada.ac.id/cgi/oai2>.

- Dharma, Nathania Yunita, Triesanto Romulo Simanjuntak, dan Putri Hergianasari. 2022. "Womenomics and Japan's Domestic Politics: The Transformation of Women Roles in the Shinzo Abe Administration." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 12 (2): 219–43. <https://doi.org/10.15575/jispo.v12i2.21177>.
- Eryano, Mochamad Bintang Putra, Nurul Amaliah Insani, Yafi Annisa Parasati, Dyah Lukita Wardhani, Khoirul Rizal Anwari, dan Ichlasul Ayyub. 2023. "Faktor Aging Population di Jepang dan Upaya Pemerintah Jepang dalam Mengatasi Fenomena Tersebut." *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 18 (2): 29–43. <https://doi.org/10.14710/sabda.18.2.29-43>.
- Fatimah, Anmita Intan, Nabila Kirana Pramadevi, Apriyanti Eka Handayani, dan Dyah Puspa Maharani. 2024. "Efektivitas Kebijakan Sekuritasi Jepang untuk Mengatasi Isu Penurunan Angka Kelahiran Tahun 2005-2022." *Jurnal Pena Wima* 4 (1). <https://doi.org/10.31315/jpw.v4i1.11847>.
- Fauzan, Muchammad Rizki, dan Satwika Paramasatya. 2022. "Upaya Jepang Dalam Melindungi Tenaga Kerja Asing Pada Technical Intern Training Program." *Journal of International Relations Diponegoro* 8 (2): 239–47. <https://doi.org/10.14710/jirud.v8i2.33575>.
- Haryadi, Edy. 2016. "HOMOGENITAS VERSUS MULTIKULTURALISME: PERDEBATAN PENERIMAAN PEKERJA ASING DI JEPANG | Hariyadi | Thaqafiyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam." 2016. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyyat/article/view/80>.
- Indun, Roosiani. 2018. "Feminisme Sebagai Gerakan Perjuangan Wanita Pasca Restorasi Meiji." *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Semester Ganjil 2017/2018*, Februari. <http://repository.unsada.ac.id/1750/>.
- Kresnawati, Megahnanda Alidyan. 2013. "Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat, Perancis, Jepang, Singapura, India, Dan China." *Global and Policy Journal of International Relations* 1 (01).
- Liu-Farrer, Gracia. 2024. "Immigrant Japan: The Reality of Immigration in a "no-Immigration" Country." https://www.hitachi-zaidan.org/global-society-review/vol2/assets/docs/pdf/vol2_article_gracia-liu-farrer_en.pdf
- Meyers, Eytan. 2000. "Theories of International Immigration Policy-A Comparative Analysis."
- Ministerial Conference on Acceptance and dan Coexistence of Foreign Nationals. 2022. "Comprehensive Measures for Acceptance and Coexistence of Foreign Nationals (FY2022 revised)."
- Nurtyandini, Resqita Trisya, dan Ranti Kemalasari. 2023. "Pengaruh Fenomena Shoushika Terhadap Perekonomian Jepang." *Power in International Relations* 8 (1): 15–29. <https://doi.org/10.22303/pir.v8i1.2>.
- PAN, Xiaoye. 2024. "Immigration Policies and Social Equilibrium under the Widening Social Disparities in Japan - Google Search." 2024. https://www.google.com/search?q=Immigration+Policies+and+Social+Equilibrium+under+the+Widening+Social+Disparities+in+Japan&rlz=1C1GCEU_enID1019ID1019&oq=Immigration+Policies+and+Social+Equilibrium+under+the+Widening+Social+Disparities+in+Japan&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBgg

[AEEUYOdIBBzQzNmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](#).

- Roosiani, Indun. 2016. "KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM penduduk JEPANG." *Media Bahasa, Sastra, dan Budaya Wahana* 1 (13). <https://doi.org/10.33751/wahana.v1i13.672>.
- Simorangkir, Maria Cristin Shara. 2017. "Feminisme pada Masa Meiji di Jepang." Thesis, Universitas Sumatera Utara. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/7588>.
- Terapulina, Mayang, dan Ihsan Hikmatullah. 2021. "Fenomena Shoushika: Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Era Kepemimpinan Shinzo Abe," Juni. https://www.academia.edu/89431607/Fenomena_Shoushika_Analisis_Kebijakan_Pemerintah_Jepang_Pada_Era_Kepemimpinan_Shinzo_Abe.
- Theresia, Yohana. 2024a. "Dilema Fenomena Shoushika Tahun 2020-2023: Antara Kebijakan Imigrasi dan Pelanggaran HAM di Jepang." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 5 (1): 10–21. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i1.2454>.
- . 2024b. "Dilema Fenomena Shoushika Tahun 2020-2023: Antara Kebijakan Imigrasi dan Pelanggaran HAM di Jepang." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 5 (1): 10–21. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i1.2454>.
- Widarahesty, Yusy. 2018. "'FATHERING JAPAN':DISKURSUS ALTERNATIF DALAM HEGEMONI KETIDAKSETARAAN GENDER DI JEPANG." *Jurnal Kajian Wilayah* 9 (1): 62. <https://doi.org/10.14203/jkw.v9i1.786>.
- Widiandari, Asri. 2021. "Keberadaan Kelompok Minoritas: Mitos Homogenitas Bangsa Jepang (pdf) | Paperity." 2021. <https://paperity.org/p/346031914/keberadaan-kelompok-minoritas-mitos-homoc>
- Yokoyama, Erica Momoka. 2024. "Japan's Foreign Worker Tally Tops Two Million For First Time - Bloomberg." 2024. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-26/japan-s-foreign-worker-tally-tops-two-million-for-first-time?sref=U3dOGIDE>.

Buku

- Akagawa, Natsuko. 2014. *Heritage Conservation and Japan's Cultural Diplomacy*. 0 ed. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315886664>.